

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Dua Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

Nama : Dian Kurniawan
NPM : 1305180001
Program Study : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Dian Kurniawan (NPM 1305180001) ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (Study Kasus Dua Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan pada Pemerintah Desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa efekti Alokasi Dana Desa yang di keluarkan oleh pemerintah pusat guna membangun wilayah pedesaan dari pinggiran.

Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah merupakan objek penelitian yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang profesi utaman penduduk desanya adalah petani kelapa sawit dan kedua desa tersebut mendapatkan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan sarana prasarana dan perekonomian desa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kebijakan Alokasi Dana Desa dan pengalokasian Dana Desa tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang efektif dalam pengalokasian Dana Desa, hal tersebut dilihat dari kurangnya fasilitas tentang pemberitahuan pengalokasian Dana Desa seperti adanya baliho dan spanduk. Serta masih ada hal yang ditutupi oleh aparaturnya desa saat peneliti melakukan observasi lapangan.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, pengalokasian Dana Desa, Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat dan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, skripsi berjudul "**Analisis Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara (Study Kasus Dua Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat)**", disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, agar kita menjadi orang-orang yang intelektual.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada yang teristimewa kedua orang tua saya Ayahanda Sugianto, dan Ibunda Ratmi yang selalu memberikan dorongan, do'a, semangat dan dana kepada saya selama menyelesaikan studi di UMSU.
2. Bapak DR. Agussani, M.A.P selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Bapak Januri S.E, M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidia Hariani S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing yang membimbing proses jalannya penyusunan skripsi serta memberikan motivasi dan arahan.

5. Ibu Dr. Prawidia Hariani S.E, M.Si, sebagai ketua program studi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi serta pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Roswita Hafni M.Si, selaku sekretaris program studi jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pegawai jurusan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si, selaku dekan FE UMSU beserta Bapak Januri S.E, M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada adinda Rika Arini selaku kekasih yang selalu memberi penyemangat dan memberi motivasi terhadap skripsi saya ini.
10. Kepada Reva Hari Wardana, Reheza Rhendra Graha, Imam Sasri Trynugraha, Neni Elviani, Dea Putri dan Evan selaku teman seperjuangan yang berusaha dan saling memotivasi agar penulisan skripsi ini dapat terwujud
11. Kepada keluarag besar IESP A angkatan 2013 selaku sahabat yang mendukung dan memberi informasi sejak penulisan hingga akhir skripsi ini.

12. Kepada adinda Vivi Dea Ananda sebagai adik yang memberikan semangat agar penulisan tugas akhir ini selesai sesuai dengan harapan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini memperkaya khasanah ilmu ekonomi kita.

Medan, 2017

Penulis

Dian Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian.....	14

BAB II : TIN JAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	16
B. Pengeluaran Pemerintah.....	33
C. Kebijakan Pemerintah	42
D. Alokasi Dana Desa.....	49
E. Penelitian Terdahulu.....	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	55
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	55
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
B. Kondisi Geografi Kecamatan Kampung Rakyat	74
C. Hasil Penelitian	79
D. Perbandingan Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Distribusi Produk Domestik Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2016 di Indonesia	3
Tabel 1.2 Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara.....	7
Tabel 1.3 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2016 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3.1 Variabel Yang dianalisis di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah	56
Tabel 4.1 Rata-rata Jumlah Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016.....	61
Tabel 4.2 Luas Wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016.....	62
Tabel 4.3 Luas Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016.....	66
Tabel 4.4 Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016	67
Tabel 4.5 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja	68
Tabel 4.6 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.7 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	69
Tabel 4.8 Tingkat Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	71
Tabel 4.9 Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2012-2016.....	72
Tabel 4.10 Sebaran Dana Desa Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara	73
Tabel 4.11 Luas Wilayah Menurut Desa	75
Tabel 4.12 Luas, Jumlah dan Kepadatan Penduduk 2017	76
Tabel 4.13 Tingkat Pendidikan Menurut Desa 2017.....	77
Tabel 4.14 Daftar Desa Tertinggal Menjadi Berkembang 2017	80

Tabel 4.15 Daftar Desa Berkembang Menjadi Mandiri 2017.....	81
Tabel 4.16 Produksi Pertanian di Desa Perk. Tolan I/II dan Desa Air Merah tahun 2017	81
Tabel 4.17 Luas,Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Kampung Rakyat 2017	84
Tabel 4.18 Perkembangan Infrastruktur di Desa Perk. Tolan I/II Tahun 2016- 2017.....	85
Tabel 4.19 Pengalihan Alokasi Dana Desa	86
Tabel 4.20 Rekapitulasi Dana Desa	87
Tabel 4.21 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perk Tolan I/II 2016.....	88
Tabel 4.22 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perk Tolan I/II 2017	89
Tabel 4.23 Luas dan Jumlah Kepadatan Penduduk 2017	92
Tabel 4.24 Perkembangan Infrastruktur Desa Air Merah 2016.....	94
Tabel 4.25 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Air Merah Pada Tahun 2016.....	95
Tabel 4.26 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Air Merah Pada Tahun 2017.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Labuhanbatu Selatan	60
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Kampung Rakyat	74
Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II	83
Gambar 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Air Merah	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara berkembang di asia tenggara yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini giat membangun baik dari sektor ekonomi, pengadaan infrastruktur maupun pembangunan Sumberdaya Manusia. Sejak tahun 1998 dan 2008 dengan tingginya nilai inflasi di Negara Indonesia menyebabkan perekonomian Negara Indonesia mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Mulai dari tahun 1998 Negara Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai sektor, khususnya ialah sektor ekonomi dan sektor pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2008 perekonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup besar. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 1997 mencapai 8,46%. Setelah tahun 1997 perekonomian Indonesia tercatat terus menurun yang diakibatkan krisis moneter dan inflasi, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 mengalami penurunan yang sangat signifikan, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia -6,21%. Dari kejadian krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 hingga sekarang tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di sekitaran 5% dan tingkat inflasi yang tergolong besar yaitu 3,82%. Sejak terpilihnya Bapak Ir. Joko Widodo sebagai presiden Indonesia, beliau terus menekan tingkat inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat bersaing dengan Negara-Negara di asia tenggara.

Mengingat pentingnya konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian perkembangan ekonomi suatu negara, maka kita selaku masyarakat sebagai pelaku ekonomi harus memahami konsep ini setidaknya mengetahui definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Data yang di peroleh dari BPS Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada tahun 2014 dan diproyeksikan akan semakin meningkat pada tahun 2015 dan 2016, seiring dengan peningkatan laju ekspor dikarenakan nilai tukar yang semakin rendah dan peningkatan dalam investasi pemerintah. Menurut data World Bank perekonomian Indonesia mengawali tahun 2017 dengan kuat, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2% dibandingkan pada triwulan terakhir pada tahun 2016 sebesar 4,9%.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016

menurut data BPS sektor yang dominan mempengaruhi PDB Indonesia ialah sektor industri. Berikut ini tabel PDB Indonesia yang di salin dari BPS

Tabel 1.1
Distribusi Produk Domestik Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Persen) 2014-2016 di Indonesia

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
A. Pertanian,kehutanan,dan perikanan	13,34	13,49	13,45
B.Pertambangan dan penggalian	9,83	7,65	7,21
C.Indutri pengolahan	21,08	20,97	20,51
D.Pengadaan listrik dan gas	1,09	1,14	1,15
E.Pengadaan air,pengolahan sampah dan daur ulang	0,07	0,07	0,07
F.Konstruksi	9,86	10,21	10,38
G.Perdagangan besar,eceran mobil dan sepeda motor	13,43	13,31	13,19
H.Transportasi dan pergudangan	4,42	5,02	5,22
I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,04	2,96	2,92
J. Informasi dan komunikasi	3,50	3,52	3,62
K. Jasa keuangan dan asuransi	3,86	4,03	4,20
L. Real estat	2,79	2,84	2,81
M,N. Jasa perusahaan	1,57	1,65	1,71
O. Administrasi pemerintah, jaminan sosial wajib	3,83	3,90	3,86
P. Jasa pendidikan	3,23	3,36	3,37
Q. Jasa kesehatan dan kegiatan social	1,03	1,07	1,07
R,S,T,U Jasa pendidikan	1,55	1,65	1,71
A.Nilai Tambah Bruto atas Harga Konstan	97,51	96,86	96,43
B.Pajak di Kurang Subsidi atas Produk	2,49	3,14	3,37
C. Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00

Sumber :BPS Indonesia Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2016 sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDB terbesar indonesia yaitu 20,51% serta pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu 13,45%. Menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN

2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah.

Dalam APBN tahun 2017, Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 85,6% berikutnya PNBPN sebesar 14,3% dan Hibah sebesar 0,1%. Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,6% selama periode tahun 2012-2017. Didalam APBN 2017, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun guna meningkatkan roda perekonomian Indonesia. Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah 2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar 330,2 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (Kemenkeu). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif. Transfer ke Daerah dan Dana Desa masih menjadi prioritas belanja negara pada tahun 2017 sebesar Rp 764,9 triliun (36,8%) dan Belanja K/L Rp 763,6 triliun (36,7%) serta Belanja Non K/L Rp 552 triliun (26,5%). Data yang di peroleh dari Kemenkeu pembagian belanja pemerintah pusat menurut fungsinya yaitu pelayanan umum 27%, ekonomi 23,6%, perlindungan sosial 12%, pendidikan 10%, ketertiban dan keamanan 9,2%, pertahanan 8,2%, kesehatan 4,7%, perumahan dan fasilitas umum 2,3%, perlindungan lingkungan hidup 0,9%, agama 0,7%, dan pariwisata 0,4%.

Dalam anggaran belanja Negara tahun 2017 transfer Daerah dan Dana Desa menjadi pengeluaran terbesar pemerintah guna untuk mensejahterakan

perekonomian Indonesia hingga ke pelosok desa. Besarnya sebaran Dana Desa tahun anggaran 2017 pulau Sumatera menjadi pulau kedua terbesar dalam penerimaan transfer Dana Desa sebesar Rp 17,997.27 milyar, kemudian di ikuti pulau Jawa menjadi penerima terbesar transfer Dana Desa Rp 18,649.59 milyar, kemudian pulau Kalimantan Rp 5,258.36 milyar rupiah, pulau Sulawesi Rp 6,872.37 milyar dan pulau Papua Rp 7,459.37 milyar. Di lihat dari besaran anggaran yang diberikan pemerintah Indonesia, bisa diartikan bahwa pemerintah pusat membangun perekonomian Indonesia dari pinggiran.

Salah satu provinsi yang mendapatkan anggaran transfer daerah dan dana desa ialah provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki ibukota provinsi terbesar ke 4 di Indonesia yaitu kota Medan, provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan bukit barisan, pesisir barat, kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi

penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai 14.102.911 juta jiwa, yang terdiri dari 7.037.326 juta jiwa penduduk laki-laki, dan 7.065.585 juta jiwa penduduk perempuan. Selain itu provinsi Sumatera Utara memiliki 28 kabupaten/kota, serta memiliki 440 kecamatan dan 5418 desa. Data tersebut diambil dari BPS. Memiliki kekayaan sumberdaya alam, provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 PDRB terbesarnya ialah sektor pertanian mencapai 24,86%. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya mencapai 19,39%. Tingginya penyumbang PDRB di sektor pertanian tidak terlepas dari melimpahnya sumberdaya alam yang ada di provinsi Sumatera Utara. Namun dengan adanya sumberdaya yang melimpah pemerintahan provinsi Sumatera Utara masih belum bisa memanfaatkannya. Hal tersebut di tandai dengan besarnya dana transfer daerah berupa bantuan Dana Desa yaitu Rp 4,197.97 milyar dalam anggaran APBN tahun 2017. Dalam APBD provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sebesar Rp 12 triliun lebih, banyak digunakan untuk anggaran belanja tidak langsung yakni Rp 8,752 triliun dimana Rp 4,282 triliunnya adalah anggaran pembangunan daerah.

Dalam APBN tahun 2017, tentang transfer Daerah dan Dana Desa. Tiap desa di provinsi Sumatera Utara mendapat transfer Dana Desa sebesar Rp 720,442 juta yang di bagikan secara merata guna di alokasikan sesuai dengan RPJMDes yang berlaku di desa tersebut. Berikut paparan kabupaten/kota yang mendapatkan transfer Dana Desa di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.2
Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2017
Di Provinsi Sumatera Utara

(ribu rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Per Desa	Alokasi Per Kab/Kota	Alokasi Formula	Jumlah
	Kabupaten					
1	Asahan	177	720,442	127,518,234	14,454,327	141,972,561
2	Dairi	161	720,442	115,991,162	10,105,628	126,096,790
3	Deli Srdang	380	720,442	273,767,960	29,292,326	303,060,286
4	Karo	259	720,442	186,594,478	9,741,648	196,336,126
5	Labuhanbatu	75	720,442	54,033,150	8,336,132	62,369,282
6	Langkat	240	720,442	172,906,080	19,957,743	192,863,823
7	Mandaling Natal	377	720,442	271,606,634	12,441,884	284,048,518
8	Nias	170	720,442	122,475,140	10,451,108	132,926,248
9	Simalungun	386	720,442	278,090,612	15,956,928	294,047,540
10	Tapanuli selatan	211	720,442	152,013,262	9,654,744	161,670,006
11	Tapanuli Tengah	159	720,442	114,550,278	8,842,956	123,393,234
12	Tapanuli Utara	241	720,442	173,626,522	7,072,304	180,698,826
13	Toba Samosir	231	720,442	166,442,102	7,041,625	173,463,727
14	Kota Padang Sidempuan	42	720,442	30,258,564	4,391,637	34,650,201
15	Pakpak Barat	52	720,442	37,462,984	5,020,897	42,483,881
16	Nias Selatan	459	720,442	330,682,878	16,135,592	346,818,470
17	Humbang Hasundutan	153	720,442	110,227,626	7,,285,660	117,513,286
18	Serdang Bedagai	237	720,442	170,744,754	13,106,061	183,849,815
19	Samosir	128	720,442	92,216,576	7,811,227	100,027,803
20	Batu Bara	141	720,442	101,582,322	11,795,034	113,377,356
21	Padang Lawas	303	720,442	218,293,926	9,882,445	228,176,371
22	Padang Lawas Utara	387	720,442	278,811,054	9,270,857	288,081,911
23	Labuhanbatu Selatan	52	720,442	37,462,984	8,559,478	46,022,462
24	Labuhanbatu Utara	82	720,442	59,076,244	9,570,695	68,646,939
25	Nias Utara	112	720,442	80,689,504	11,134,690	91,824,194
26	Nias Barat	105	720,442	75,646,410	8,088,286	83,734,696
27	Kota Gunungsitoli	98	720,442	70,603,316	9,214,822	79,818,138
JUMLAH		5,418	19,451,934	3,903,354,756	294,617,34	4,197,972,490

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017

Dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa kabupaten Nias Selatan menerima transfer Dana Desa terbesar yaitu Rp 346,818,470 dengan jumlah desa 459 dan jumlah transfer yaitu Rp 720,442, Namun kota Padang Sidempuan mendapatkan transfer terendah yaitu Rp 34,650,201 dengan jumlah desa 42.

Berbeda dengan kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah desa sama dengan Kota Padang sidempuan namun jumlah transfer Dana Desa berbeda. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki 5 kecamatan yaitu kecamatan Kotapinang, kecamatan Kampung Rakyat, kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan dan kecamatan Silangkitang, serta memiliki 52 desa. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki jumlah penduduk 326,825 jiwa dengan kepadatan penduduk 102 jiwa per Km². Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pecahan dari kabupaten Labuhanbatu yang di bentuk pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 2008, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan ibukota Kota Pinang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Labuhanbatu, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau dan kabupaten Padang Lawas Utara dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Padang Lawas Utara.

Pada tahun 2016 ini kabupaten Labuhanbatu Selatan penyumbang PDRB terbesar adalah sektor Industri Pengolahan yaitu 40,22%, sedangkan sektor Pertanian hanya menyumbang 32,28%.Berikut nilai dan konstribusi sektor dalam PDRB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 1.3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015– 2016 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Lapangan Usaha	2015	2016
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	32,34	32,28
2	Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,33
3	Industri Pengolahan	40,27	40,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02
6	Konstruksi	6,32	6,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,55	12,54
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,83
10	Informasi dan Komunikasi	0,47	0,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	0,96
12	Real Estate	2,30	2,30
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,54	1,56
15	Jasa Pendidikan	0,49	0,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,33	0,33
17	Jasa lainnya	0,08	0,08
PDRB		100	100

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017

Dari tabel diatas penyumbang PDRB kabupaten Labuhanbatu Selatan terbesar pada sektor Industri Pengolahan 40,22% karena terdapat banyak pabrik pengolahan CPO di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor unggulan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kecamatan Kampung Rakyat sebagai kecamatan yang paling besar menghasilkan panen kelapa sawit yaitu 160.682 ton, Sungai Kanan 148.650 ton, Kota Pinang 146.450 ton, Torgamba 126.590 ton dan Silangkitang 44.932 ton (bps: labuhanbatu selatan dalam angka 2016). Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang. Penyumbang PDRB terkecil yaitu 0,02%. Mayoritas pendapatan

masyarakat di kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan petani dan industri pengolahan seperti UMKM. Namun tingkat infrastruktur tidak memadai, contohnya saja sampai saat ini pemerintahan kabupaten Labuhanbatu Selatan belum mempunyai kantor BPS sendiri dan masih menumpang di kabupaten Labuhanbatu. Perkembangan infrastruktur di kabupaten Labuhanbatu Selatan kian membaik, tercatat panjang jalan di Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016 sepanjang 550,36 Km, yang terdiri dari 317,62 Km jalan beraspal, 197,53 Km jalan berkerikil dan 29,53 Km jalan tanah. Sementara menurut kondisinya, jalan yang dalam keadaan baik adalah 323,37 Km, keadaan sedang 86,10 Km, keadaan rusak 73,03 Km, dan keadaan rusak berat sepanjang 67,86 Km, data tersebut diperoleh dari bps kabupaten Labuhanbatu.

Menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya memiliki 2 desa yang tertinggal menjadi berkembang yaitu desa Perkebuna Tolan I/II serta desa Air Merah yang kedua desa tersebut terletak pada kecamatan Kampung Rakyat. Kedua desa tersebut menjadi berkembang karena perekonomian disana berangsur membaik serta pengelolaan trafer dana desa yang di peruntuhkan oleh daerah sesuai dengan tujuan, dan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun data tersebut berbanding terhadap data yang ada di bps. Karena menurut bps, desa di kabupaten Labuhanbatu Selatan masih ada beberapa yang tertinggal. Diduga masih adanya beberapa desa yang pengoptimalannya kurang strategis atau tidak sesuai dengan tujuan yang disusun dalam RPJMDes. Selain itu hanya segelinitir desa yang melaukan asas pengelolaan keuangan tersebut.

Data yang diambil dari beberapa situs portal yang ada di setiap desa hanya beberapa yang belum menerapkan asas tersebut, guna alokasi dana desa yang diberikan pemerintah yang bersumber pada APBN dapat dioptimalkan. Dengan adanya penerapan asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin anggaran, sehingga seluruh elemen masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa dan mengawasi dana desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal sudah mewajibkan bagi setiap kepala desa harus mendirikan balaiho tentang paparan alokasi dana desa dan APBDes dalam waktu satu tahun kerja.

Kementerian Keuangan Indonesia memberikan kebijakan transfer dana daerah berupa dana desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong kurang efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan perekonomian di setiap desa mengindikasikan kurang efektifnya penyaluran dana desa yang besaran transfernya sama. Karena setiap desa pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga berbeda. Di desa yang sedang berkembang membutuhkan sokongan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian di desa tersebut.

Pemerintah sudah harus melakukan evaluasi kebijakan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang dilakukan untuk memastikan pembagian dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

serta evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa untuk mengetahui realisasi penggunaan dana desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu

“Analisis Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utaran(Study Kasus Dua Desa Di Kecamatan Kampung Rakyat)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah mengenai analisis evaluasi kebijakan alokasi dana desa di provinsi Sumatera Utara kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut yaitu:

1. Tidak efektif dalam mengoptimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk membangun infrastruktur pada wilayah pedesaan di Indonesia.
2. Perbedaan karakteristik suatu desa dapat mengindikasikan bahwa Alokasi Dana Desa yang dibagikan secara merata tidak digunakan secara benar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
3. Aparatur pemerintahan desa atau SDM yang tidak terbuka dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas pengelolaan keuangan.
4. Sumberdaya manusia yang melimpah tetapi kurang dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam mengelola usaha yang dikelola oleh desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa.
5. Banyaknya Alokasi Dana Desa yang diterima kurang dimanfaatkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sehubungan dengan data yang di peroleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada satu desa yang tertinggal menjadi berkembang dan satu desa yang berkembang menjadi mandiri, serta keterbatasan waktu, biaya dan sumber data maka batasan masalah yang difokuskan dari penelitian ini yaitu evaluasi kebijakan alokasi dana desa di desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Bagaimana perkembangan infrastruktur di desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah sebelum dan setelah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa yang diperuntuhkan daerah?
2. Bagaimana mengatasi pembagian Alokasi Dana Desa agar efektif dalam penggunaannya di dua desa yaitu desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana aparatur pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dengan efektif, transparansi dan akuntabilitas?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

1. Melakukan analisis perkembangan infrastruktur sebelum dan sesudah transfer Alokasi Dana Desa yang diperuntuhkan oleh daerah di Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis proporsi penggunaan Alokasi Dana Desa tiga tahun terakhir yang dibagikan secara merata di dua desa yaitu desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
3. Melakukan evaluasi penerapan asas pengelolaan keuangan agar bersifat terbuka dan akuntabel.

F. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini dapat bermanfaat, yakni:

1. Manfaat akademik :
 - a. Membantu perkembangan ilmu ekonomi terkhususnya ekonomi publik dan ekonomi pembangunan tentang kebijakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN.

- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam mengetahui evaluasi kebijakan alokasi dana desa
- c. Memberikan pengetahuan dalam mengelola anggaran pemerintah khususnya Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat non akademik :

- a. Bagi pemerintah daerah desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya Alokasi Dana Desa.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Dapat menjadikan suatu pemahaman bagi para pembaca agar memberikan suatu ilmu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi atau proses peningkatan pendapatan per kapita yang disertai dengan proses transformasi dari suatu perekonomian yang dominan sektor industri, terutama industri manufaktur dan sektor jasa. Berdasarkan pengertian pembangunan ekonomi tersebut maka pembangunan ekonomi menjadi proses yang multi dimensional dengan tujuan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, pengelolaan sumber – sumber yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Banyak orang yang masih belum dapat membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pengertian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda dimana pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dimana pendapatan per kapita penduduk suatu negara secara riil cenderung naik secara terus menerus dalam jangka panjang, dengan syarat utama jumlah penduduk yang berada dalam garis kemiskinan absolut tidak bertambah dan distribusi pendapatan tidak menjadi timpang. Namun pengertian pembangunan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari peningkatan

pendapatan per kapita melainkan kualitas pembangunan ekonomi yang baik seyogyanya tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara. Berikut beberapa teori tentang pembangunan ekonomi:

1. Teori Pembangunan Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang

tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. (Jhingan: Pembangunan Ekonomi dan Perancangan halaman 81)

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal, menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang

dimungkinkan oleh karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, menurut Smith, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan pertumbuhan output, menurut Smith, karena spesialisasi tersebut bisa meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan. Menurut Smith, potensi pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika, dan hanya jika, setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penghilangan peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga masyarakat antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*. Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurunkan dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (D) tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja (S). Sementara itu permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

Kritik terhadap Teori Adam Smith

Seperti digambarkan di muka, teori Adam Smith ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan faktor-faktor apa yang dapat menghambatnya. Namun demikian, ada beberapa kritik terhadap teori Adam Smith antara lain:

1. Pembagian Kelas dalam Masyarakat

Teori Smith ini didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di Inggris dan di beberapa negara Eropa. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara tegas yaitu antara golongan kapitalis (termasuk tuan tanah) dan para buruh. Padahal dalam kenyataannya,

seringkali kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, teori Smith mengabaikan peranan kelas menengah dalam mendorong pembangunan ekonomi.

2. Alasan Menabung

Menurut Smith orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan lintah darat. Namun ini adalah alasan yang tidak adil, sebab tidak terpikir olehnya bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat yang maju adalah para penerima pendapatan, dan bukan kapitalis serta tuan tanah.

3. Asumsi Persaingan Sempurna

Asumsi utama teori Adam Smith ini adalah persaingan sempurna. Kebijakan pasar bebas dari persaingan sempurna ini tidak ditemukan di dalam perekonomian manapun. Sejumlah kendala batasan malahan dikenakan pada sektor perorangan (misalnya larangan monopoli) dan perdagangan internasional (misalnya adanya proteksi) pada setiap negara di dunia.

4. Pengabaian Peranan *Entrepreneur*

Smith agak mengabaikan peranan entrepreneur dalam pembangunan. Padahal para entrepreneur ini mempunyai peranan yang sentral dalam pembangunan. Mereka inilah yang menciptakan inovasi dan pada akhirnya menghasilkan akumulasi modal.

5. Asumsi *Stasioner*

Menurut Smith, hasil akhir suatu perekonomian kapitalis adalah keadaan stasioner. IN berarti bahwa perubahan hanya terjadi di sekitar titik keseimbangan tersebut. Padahal dalam kenyataannya proses pembangunan itu seringkali terjadi teratur dan tidak seragam. Jadi asumsi ini tidak realistis.

2. Teori David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Todaro). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation (1917)*. melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “ pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap

4. Permintaan gandum benar – benar inelastik
5. Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

David Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan, yaitu :

1. Masyarakat pengusaha atau kapitalis, adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional.

2. Masyarakat pekerja atau buruh, adalah golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital.
3. Tuan tanah atau bangsawan, adalah golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan

David Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori sewa tanah (land rent); teori nilai kerja (labor theory of value) dan upah alami (natural wages); dan satu lagi yang terkenal adalah teori keuntungan komparatif (comparative advantage) dari perdagangan internasional.

a. Teori Sewa Tanah

Dalam teori tentang sewa tanah ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Ada yang subur, kurang subur hingga tidak subur sama sekali. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi, dan demikian menghasilkan satu satuan unit produksi diperlukan biaya-biaya (biaya rata-rata dan biaya marjinal) yang lebih rendah pula. Makin rendah tingkat kesuburan tanah, jelas makin tinggi pula biaya rata-rata dan biaya marjinal untuk mengolah tanah tersebut. Makin tinggi biaya-biaya dengan sendirinya keuntungan per hektar tanah menjadi semakin kecil pula. Dengan penjelasan di atas adalah layak uang sewa untuk tanah yang lebih subur lebih tinggi jika dengan sewa tanah untuk tanah yang kurang subur apalagi yang tidak subur.

b. Teori Nilai Kerja dan Upah

Teori nilai kerja dan upah alami, David Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya untuk bahan mentah dan upah buruh

yang besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup (subsiten) bagi buruh yang bersangkutan. Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya (termasuk upah alami), maka dalam jangka pendek perusahaan akan mengalami laba ekonomi. Adanya laba ini akan menarik perusahaan-perusahaan lainnya masuk pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru berarti produksi akan meningkat dan sebagai akibatnya akan terjadi kelebihan produksi (over supply) di pasar. Kelebihan penawaran barang ini akan mendorong harga-harga turun kembali kepada keseimbangan semula. Karena biaya-biaya bahan mentah relatif konstan, maka Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, yang besarnya hanya cukup agar para buruh dapat bertahan hidup saja (secara subsiten). Selain itu, Ricardo mempertimbangkan kondisi pekerja, yang mana jika standar kehidupan minimum meningkat, maka upah minimum juga meningkat. Menurut Ricardo, ketika standar umum kehidupan meningkat, upah minimum yang dapat dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. Dengan demikian, tingkat upah pada abad ke-19 tidak akan sama dengan tingkat upah pada abad ke-20. Hal ini mengisyaratkan bahwa Ricardo mengantisipasi adanya perubahan perekonomian secara menyeluruh.

Penilaian Kritis / Kebaikan Teori David Ricardo

David Ricardo adalah pelopor ahli ekonomi modern dan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi telah dianut oleh banyak kalangan. Pendapat-pendapatnya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Pertanian

Pentingnya pembangunan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pembangunan industri tergantung pada sektor pertanian.

2. Tingkat Keuntungan.

Peningkatan tingkat keuntungan dalam pembangunan ekonomi sebab pemupukan modal tergantung pada kenaikan tingkat keuntungan.

3. Pentingnya Tabungan.

Pentingnya tabungan pada pemupukan modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

4. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri sebagai sarana memperbaiki keadaan perekonomian sebab perdagangan luar negeri akan membawa pemanfaatan sumberdaya secara maksimum dan meningkatkan pendapatan.

5. Teori Dinamis

Ricardo menyajikan suatu teori yang dinamis yang menganalisa pengaruh perubahan dari berbagai variable pada pembangunan ekonomi seperti penduduk, upah, sewah, keuntungan dan sebagainya.

Kelemahan Teori David Ricardo

Disamping kebaikan, teori Ricardo mempunyai kelemahan tertentu, antara lain :

1. Mengabaikan pengaruh teknologi.

Pada mulanya kemajuan teknologi bisa menahan laju penurunan hasil. Tetapi akhirnya bila pengaruh kemajuan teknologi habis, hukum penurunan hasil berlaku lagi dan perekonomian bergerak menuju stasioner (law of diminishing return). Ricardo kurang memperkirakan potensi kemajuan teknologi dalam menahan menurunnya hasil tanah. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju.

2. Pengertian yang salah tentang keadaan stasioner.

Pandangan Ricardo tentang mencapai keadaan yang stasioner secara otomatis tidak beralasan, sebab tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stasioner dengan keuntungan meningkat, produksi meningkat dan pemupukan modal tercapai.

3. Pengertian yang salah tentang penduduk.

Menurut Ricardo meningkatnya jumlah penduduk maka upah tidak dapat meningkat, tidak terbukti. Upah tidak cenderung menuju ke tingkat upah minimal. Sebaliknya, terjadi peningkatan upah yang terus menerus dalam bentuk upah uang dan dengan sendirinya penduduk cenderung menurun.

4. Kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan.

Menurut Ricardo kebijakan pasar bebas tidak dapat diterapkan, bila ada campur tangan dari pemerintah karena perekonomian berjalan otomatis melalui persaingan yang sempurna.

5. Mengabaikan faktor-faktor kelembagaan

Salah satu cacat yang paling pokok dari teori Ricardo adalah diabaikan peran kelembagaan. Padahal faktor kelembagaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan tidak dapat diabaikan.

6. Teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan.

Teori Ricardo bukanlah teori pertumbuhan tetapi teori distribusi yang menentukan besarnya bagian buruh, tuan tanah dan pemilik modal.

7. Tanah juga menghasilkan selain gandum.

Ricardo berpendapat dalam rangka pertumbuhan ekonomi hanya satu produk yang bisa dihasilkan dari tanah yaitu gandum. Ini adalah pendapat yang usang sebab ternyata tanah bisa menghasilkan berbagai macam produk selain gandum.

8. Modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap.

Asumsi Ricardo bahwa modal dan buruh merupakan koefisien produksi yang tetap adalah tidak benar. Asumsi ini tidak berlaku sebab buruh dan modal adalah variabel bebas.

9. Mengabaikan tingkat suku bunga

Kelemahan yang serius dari teori Ricardo adalah pengabaian tingkat suku bunga dalam pertumbuhan ekonomi. Ricardo tidak menganggap tingkat bunga sebagai suatu imbalan jasa yang terpisah dari modal tetapi termasuk dalam keuntungan. Pendapat yang salah ini berasal dari ketidakmampuannya untuk membedakan pemilik modal dari pengusaha.

10. Teori Ricardo dan negara terbelakang

Disamping kelemahan tersebut, teori Ricardo juga memperlihatkan pentingnya pemupukan modal melalui pembangunan pertanian, dan pentingnya perluasan berbagai sumber tabungan dan kenaikan tingkat keuntungan. Teori Ricardo tidak sepenuhnya dapat diterapkan di negara berkembang, tetapi ia dapat menunjukkan faktor yang menghambat tingkat perkembangan ekonomi di negara tersebut.

3. Teori Malthus Mengenai Pembangunan Ekonomi

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat, memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi, menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih dari pada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pada bukunya *Principles of Political Economy*, Malthus lebih realistis dalam menganalisa pertumbuhan penduduk dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dibandingkan pada bukunya *Essay of Population*. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Sebagaimana ditulis Malthus : “Pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding.” Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk.

Peranan produksi dan distribusi. Maltus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Maltus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara gross national product potential dan gross national product actual.

Proses akumulasi modal.

Akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Maltus mengatakan, “peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal secara terus menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba. Maltus mengatakan : “kekayaan suatu negara pada umumnya diciptakan oleh tabunagan yang disisihkan dari keuntungan yang meningkat, dan sama sekali karna pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah dan barang-barang kesenangan.

Kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus ini didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan pada penolakannya terhadap hukum pasar yang dikemukakan Say. Malthus tidak sependapat dengan Say yang mengatakan bahwa di dalam pasar tidak mungkin terjadi over produksi atau penawaran yang berlebihan. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu dipertukarkan dengan komoditi. Stagnasi ekonomi. Maltus yakin penawaran buruh dalam jangka pendek sangat tidak elastis. Dia mengatakan “ karena sifat dasar

penduduk, kebutuhan tambahan pekerja untuk memenuhi permintaan tertentu, tidak dengan segera tersedia di pasar, sampai selang waktu enam belas atau delapan belas tahun.” Tetapi persediaan modal dapat ditingkatkan lebih cepat dibanding pertambahan penduduk.

Langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

1. Pertumbuhan berimbang. Di dalam sistem Malthus, perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri.
2. Menaikkan permintaan efektif. Akan tetapi kemajuan teknologi saja tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi, kecuali kalau permintaan efektif meningkat.

Malthus menyarankan sejumlah langkah untuk menaikkan permintaan efektif :

1. Dengan pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara lebih adil.
2. Permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Perdagangan internal sebagaimana juga perdagangan eksternal akan meningkatkan keinginan, selera, dan hasrat, untuk mengkonsumsi yang secara mutlak perlu untuk menjaga harga pasar komoditi dan mencegah berkurangnya laba.
3. Malthus menyarankan agar mempertahankan, “konsumen tidak produktif”
4. untuk meningkatkan permintaan efektif. Konsumen tidak produktif adalah orang-orang yang tidak memproduksi barang material. Malthus menyarankan program pekerjaan umum untuk mengatasi pengangguran dan menaikkan permintaan efektif. Malthus menunjukkan bahwa “mempekerjakan si miskin pada proyek jalan dan pekerjaan umum serta kecenderungan di antara para tuan tanah

dan orang-orang kaya untuk membangun, memperbaiki dan mempercantik daerah mereka serta mempekerjakan pekerja pria dan buruh-buruh kasar, merupakan sarana untuk mengobati penyakit yang timbul dari gangguan pada keseimbangan antara produksi dan konsumsi tersebut. Tetapi dia sendiri mencatat ada dua kelemahan pada langkah ini. *Pertama*, langkah ini dapat menghalangi tenaga kerja dari kemungkinan menyesuaikan diri secara berangsur-angsur terhadap permintaan yang berkurang. Dia berpendapat, hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan upah rendah kepada pekerja. *Kedua*, langkah tersebut memaksa peningkatan pajak guna membiayai pekerjaan umum yang dengan demikian akan mengurangi investasi swasta. Tetapi bagi Malthus kelemahan ini sebenarnya merupakan keuntungan pekerjaan umum karena hal itu tidak akan mempunyai kecenderungan mengurangi modal yang dipakai oleh tenaga kerja produktif.

B. Pengeluaran Pemerintah

Konsumsi atau pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk meleksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat

dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. (Suparmoko, 1998). Sedangkan pengeluaran dapat kita kelompokkan dalam dua golongan yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari : Belanja pegawai, yaitu untuk pembiayaan gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan. Belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang. Belanja pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik. Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

Pengeluaran rutin memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pembangunan

ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

1. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara – negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Ket;

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

2. Teori Peacock dan Wiserman

Teori Peacock dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai

pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utangan bunganya.

3. Teori Rostow dan Musgrave

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, ini ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Faktor Pengeluaran Pemerintah, Menurut Dr.Guritno Mangkoesoe-broto, M.Ec, perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga faktor-faktor produksi.

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan

bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Sebaliknya terdapat elemen pengeluaran pembangunan yang sebagian besar merupakan pengeluaran untuk investasi (capital expenditure) dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat konsumsi, seperti berbagai jenis upah dan gaji tambahan. Dari kedua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran pembangunanlah yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah pusat (Matriks Investasi Pemerintah BPS).

Pengeluaran Pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk

menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sadono Sukirno, 2004).

Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi-subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam pengeluaran pembangunan.

Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi. Misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang

kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah ini secara tidak langsung merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut masalah pemilihan prioritas pengeluaran pembangunan tersebut merupakan hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana anggaran pembangunannya.

Menurut (Dumairy, 2001) Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu:

1. Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan ataupun penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen / lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

2. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

C. Kebijakan Pemerintah

Istilah kebijakan atau yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sejak dari awal, pemerintahan Indonesia memberlakukan kebijakan pembangunan daerah pinggiran. Pada pemerintahan Presiden Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu UU No 22/1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. UU No 22/1999 mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada pemerintahan daerah dan membentuk proses politik daerah. UU No 25/1999 mendorong desentralisasi dengan memberikan pembagian sumberdaya fiskal kepada pemerintahan daerah. Keadaan tersebut, terutama motivasi politik, tidak diragukan lagi mempengaruhi banyak aspek dalam otonomi daerah. Kedua UU di atas menegaskan adanya

fungsi dan kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dibandingkan UU No 5/1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebut diterapkannya pendekatan *big bang*, radikal, dalam struktur pemerintahan dan desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pola hubungan pusat dan daerah (Mudrajad Kuncoro: 2014, Otonomi Daerah, 45).

Oleh sebab itu pada orde pemerintahan presiden Jokowi membuat kebijakan tentang pembangunan berbasis pinggiran yang di tandai terwujudnya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pendapat beberapa ahlitentang kebijakan pemerintah diartikan sebagai berikut ini:

1. Friedrik (1963) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.
2. Menurut PBB: Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
3. Lasswell (1970) Berpendapat Bahwa kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals values and practices).
4. Carter V. Good (1959). Berpendapat Bahwa kebijakan merupakan sebuah

pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional, untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program maupun pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Definisi kebijakan pemerintah menurut para ahli sebagai berikut :

1. Thomas R. Dye mengatakan Kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).

2. Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko, 2003:42)

Paparan diatas merupakan pengertian dari kebijakan pemerintah. Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia memerlukan beberapa kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan baik di sektor infrastruktur maupun di sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi pemerintahan sudah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan memperbaiki dan memajukan sektor ekonomi. Negara yang berkembang merupakan Negara yang dapat menstabilkan perekonomian dan mengurangi tingkat inflasi.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn. adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy

issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. Menjangkau dampak yang amat luas.
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

Karakteristik Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari

pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui serta memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun banyak sekali hal-hal yang tersirat(kontekstual) yang tidak diketahui oleh public dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk tranformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat berperan untuk dapat menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah 2 tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan public dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni public/ kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi.

Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/social masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

D. Alokasi Dana Desa

Sebelum terlalu jauh membahas Alokasi Dana Desa berikut merupakan ulasan tentang desa.

Desa, atau udik, menurut definisi "universal" adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

UU no. 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

UU no. 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

UU no. 6 tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP No. 72 Tahun 2005 tersebut telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besaran anggaran

per-desa, mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), pengguna dana sampai dengan pertanggung jawabannya. Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat, desa memiliki hak untuk mendapatkan dana perimbangan yang bersumber dari bagian pajak daerah dan retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam ayat 3 juga dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (selanjutnya disebut APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan data primer dan data sekunder, namun juga dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pemerintah tentang alokasi dana desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Tahun Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
	Penulis				
1	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Oleh Ni Putu Mulya Resdiyanti, Bandiyah Dan Kadek Wiwin Dwi Wismayanti	2015	Untuk mempelajari dan menggambarkan tentang Implementasi Alokasi Dana Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Muruona kecamatan Ile Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.	Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif	Hasil analisis menunjukkan masih ada beberapa yang kurang memanfaatkan Alokasi Dana Desa sehingga kurang efektif. Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan RPJMaDes oleh perangkat desa sehingga pengimplementasian Dana Desa kurang memenuhi sasaran

2	Efektifitas Alokasi Dana Desa Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh Azwardi Sukanto	2015	Untuk mengkaji penyaluran Alokasi Dana Desa dan keterkaitannya dengan kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan	Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis tren (tabel dan grafik)	Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang terkait dengan penyaluran ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oleh I Wayan Saputra	2016	Mengetahui tingkat efektivitas tingkat pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lambean serta cara menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa.	Menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan pemerintahan desa.	Berdasarkan kriteria rasio efektifitas tingkat efektifitasnya mencapai 90-100%. Dan mendapati beberapa hambatan pemikiran masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami dan ikut serata dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kismoyoso Dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali. Oleh Muhammad ismail	2016	Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan pengelolaan dana desa.	Menggunakan metode Kualitatif dengan cara observasi untuk mendapatkan gambaran nyata.	Dari hasil observasi di temukan beberapa temuan yaitu beberapa kepala desa dan aparat pemerintahan desa belum begitu paham dan siap dengan pelaksanaan UU 6/2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Kuncoro (2013: 145) menjelaskan metode kualitatif adalah data yang tidak dapat di ukur dalam skala numeric. Namun, karena dalam statistika sebuah data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya di kuantitatifkan agar dapat di proses lebih lanjut. Caranya adalah dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori.

Secara lebih spesifik, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis evaluasi kebijakan alokasi dana desa.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penafsiran terhadap variabel penelitian diperlukan untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Definisi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1998). Adapun definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel Yang Di Analisis
Di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah

No	Indikator	Defenisi	Sumber Data
1	Infrastruktur a. Jalan b. Sarana Kesehatan Publik c. Rumah Ibadah d. Fasilitas Kantor Desa e. Dan lain-lain	Sarana fisik maupun nonfisik yang dibangun dan dirawat pemerintahan desa agar menunjang perekonomian dan memberikan akses bagi penduduk desa	www.labuhanbatukab.bps.go.id dan Observasi Lapangan
2	Alokasi Dana Desa a. Besaran Transfer Alokasi Dana Desa b. Pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa	dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.	www.kemenkeu.go.id , www.kemendes.go.id dan Observasi Lapangan
3	Ekonomi a. Pengelolaan Keuangan Desa b. Pengelolaan APBDes c. Pengelolaan BUMDes	Salah satu indikator yang menggambarkan maju atau berkembangnya suatu individu maupun suatu daerah yang melakukan kegiatan produksi ataupun konsumsi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.	www.labuhanbatukab.bps.go.id dan Observasi Lapangan

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera. Alasan dipilihnya tempat penelitian di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah sehubungan dengan data yang di peroleh dari Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi bahwa ada satu desa yang tertinggal menjadi berkembang serta satu desa yang berkembang menjadi mandiri keterbatasan waktu dan *link* untuk mengambil data.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan September hingga bulan Oktober tahun 2017.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data ini menggunakan kata-kata dan angka untuk menggambarkan fenomena yang diamati. Dan data kuantitatif berguna menambah data-data pendukung dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder yang merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu dan melakukan observasi lapangan di dua desa yaitu desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Mengentri data yang diperoleh dari berbagai sumber ataupun observasi lapangan guna melihat perkembangan dan pertumbuhan subjek yang diteliti serta melakukan analisis.
3. Melakukan penghitungan proporsi Alokasian Dana Desa serta penggunaannya untuk infrastruktur fisik.
4. Memberikan *quesioner* sederhana kepada aparatur desa dan penduduk sekitar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder, dan data primer bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Letak

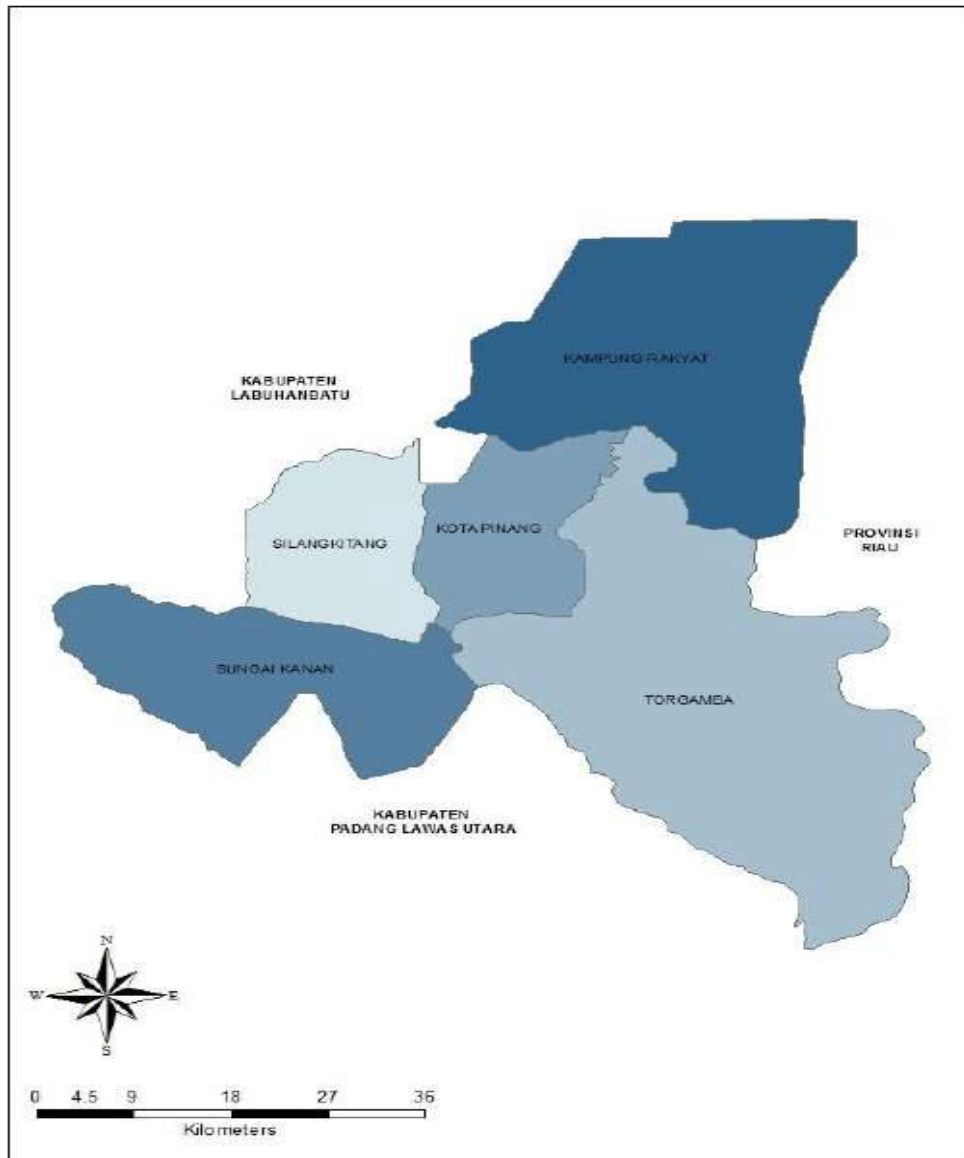
Secara astronomis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada $1^{\circ}26'00''$ – $2^{\circ}15'55''$ Lintang Utara, $99^{\circ}40'00''$ – $100^{\circ}26'00''$ Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian di bawah 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang

Lawas Utara.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki batas-batas. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

Berikut gambaran peta Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2017

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Labuhanbatu Selatan



b. Iklim

Kabupaten Labuhan batu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim

kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Tabel 4.1

Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Setiap Bulan

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Tahun 2016

No	Bulan	Hari hujan (Hari)	Curah Hujan (MM)
1	Januari	10	164
2	Febuari	7	173
3	Maret	3	63
4	April	8	162
5	Mei	9	107
6	Juni	5	102
7	Juli	11	131
8	Agustus	3	27
9	September	11	153
10	Oktober	8	205
11	November	18	338
12	Desember	16	195

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember. Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan batu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

c. Luas Wilayah

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati area seluas 311.600 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 52 Desa/ 2 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Labuhanbatu Selatan di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten

Labuhanbatu, di sebelah Selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau. Berikut banyaknya desa menurut tingkat Kecamatan

- Kecamatan Sungai Kanan; terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Torgamba; terdiri dari 14 desa.
- Kecamatan Kotapinang; terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Silangkitang; terdiri dari 6 desa;
- Kecamatan Kampung Rakyat; terdiri dari 15 desa.

Berikut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu tentang luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut kecamatan pada tahun 2017 sebagai berikut

Tabel 4.2

Luas Wilayah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Sungai Kanan	484,35	15,54
2	Torgamba	1.136,40	36,47
3	Kota Pinang	482,40	15,48
4	Silangkitang	303,70	9,75
5	Kampung Rakyat	709,15	22,76
Jumlah		3.116	100

Sumber : BPS Labuhanbatu 2017

Pada tabel diatas yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Labuhanbatu wilayah kecamatan terluas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kecamatan Torgamba dengan luas wilayah 1.136,40 Km². Serta kecamatan terkecil dengan luas wilayah 303,70 Km² ialah Kecamatan Silangkitang.

2. Perkembangan Wilayah Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara. Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bentuk pada masa jabatan kepresidenan bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan pada hal-hal berikut ini:

1. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63 Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan DPRD Labuhanbatu Terhadap Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63a Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Penetapan ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Surat Keputusan DPRD Labuhanbatu No. 63b Tahun 2005 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kesanggupan Dukungan Dana dari Kabupaten Labuhanbatu (induk) untuk Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Keputusan Bupati Labuhanbatu No.135/226/PEM/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Surat Bupati Labuhanbatu No.135/2698/Pem/2005 tanggal 1 November 2005 perihal Mohon Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

6. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 1/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.
7. Surat Gubernur Sumatera Utara No.903/035.K/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Bantuan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumatera Utara Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu No. 08 Tahun 2008 tanggal 5 Mei tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu.
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu No.903/452/Pem/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu.
10. Surat gubernur Sumatera Utara No.135/6191 tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tercantum dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu ini terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 desa/kelurahan. Kecamatan tersebut yaitu:

- Kotapinang
- Kampung Rakyat
- Torgamba
- Sungai Kanan dan
- Silangkitang

3. Kondisi Demografi

a. Penyebaran Penduduk

Pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 326.825 jiwa dengan kepadatan penduduk 102 jiwa per Km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba yaitu sebanyak 114.638 jiwa dengan kepadatan penduduk 100 jiwa per Km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Silangkitang sebanyak 31.683 jiwa dengan kepadatan penduduk 104 jiwa per Km². Kecamatan Kotapinang merupakan kecamatan yang paling

padat penduduknya dengan kepadatan 127 jiwa per Km² dan Kecamatan Kampung Rakyat merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 84 jiwa per Km². Pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki sebesar 163.390 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 156.991 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,08 persen. Berikut tabel luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel 4.3

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Tahun 2016**

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Sungai Kanan	484,35	15,54	53.143	16,59	109,72
2	Torgamba	1136,40	36,47	114.638	35,78	100,88
3	Kota Pinang	482,40	15,48	61.322	19,14	127,12
4	Silangkitang	303,70	9,75	31.683	9,89	104,32
5	Kampung Rakyat	709,15	22,76	59.595	18,60	84,04
Labuhanbatu Selatan		3.116	100	326.825	100	102,82

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2017

Pada tabel diatas yang bersumber dari BPS Kabupaten Labuhanbatu dapat disimpulkan bahwasannya kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Torgamba dengan jumlah penduduk 114.638 jiwa dan kecamatan dengan penduduk terkecil ialah kecamatan Silangkitang sebesar 32.683 jiwa. Data jumlah penduduk menurut kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan dan jenis kelamin.

Tabel 4.4
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk (orang)			Rasio jenis kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungai Kanan	26.886	26.257	53.143	102,40
2	Torgamba	58.840	55.798	114.638	105,45
3	Kotapinang	31.173	30.149	61.322	103,40
4	Silangkitang	16.050	15.633	31.683	102,67
5	Kampung Rakyat	30.441	29.154	59.595	104,41
Labuhanbau Selatan		163.390	156.991	320.381	104,48

Sumber : BPS Labuhanbatu 2017

Kesimpulan pada tabel diatas ialah bahwasannya di kecamatan Torgamba mendominasi penyebaran penduduk menurut jenis kelamin. Pada kabupaten Labuhanbatu Selatan penduduk dengan jenis kelamin Laki-laki lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan.

b. Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2016 adalah 106 orang, yang terdiri dari 55 tenaga kerja laki-laki dan 51 perempuan. Selama tahun 2016, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat 7 orang tenaga kerja warga negara asing yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian. Sementara itu, 31 orang mengikuti latihan kerja aneka kejuruan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja yaitu

Tabel 4.5
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15-19	3.597	2.382	5.979
20-24	11.826	5.908	17.734
25-29	13.283	5.706	18.989
30-34	12.989	5.965	18.954
35-39	11.589	7.392	18.981
40-44	10.135	5.621	15.756
45-49	8.702	4.894	13.596
50-54	6.446	4.099	10.545
55-59	4.221	2.149	6.370
60+	3.168	1.674	4.842
Jumlah	85.956	45.790	131.746

Sumber : BPS Labuhanbatu 2017

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat usia kerja 25-29 paling banyak untuk laki-laki dan usia kerja 35-39 untuk perempuan. Total pekerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan usia kerja 15-60 tahun keatas yaitu 131.746 jiwa. Selain itu usia kerja 15 tahun keatas sesuai data yang diperoleh dari Bada Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu selatan menurut lapangan usaha ialah

Tabel 4.6
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	60.999	25.125	85.734
Manufaktur	2.328	114	2.442
Jasa	23.029	20.551	43.580
Jumlah	85.956	45.790	131.746

Sumber : Labuhanbatu Selatan Dalam Angka 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya penduduk kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan jasa. Namun lapangan kerja manufaktur menyerap tenaga kerja sekitar 2.442 jiwa.

4. Keadaan Ekonomi

Pada tahun 2016 kabupaten Labuhanbatu Selatan penyumbang PDRB terbesar adalah sektor Industri Pengolahan yaitu 40,22%, sedangkan sektor Pertanian hanya menyumbang 32,28%. Berikut nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tabel 4.7
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015–
2016 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Lapangan Usaha	2015	2016
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	32,34	32,28
2	Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,33
3	Industri Pengolahan	40,27	40,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02
6	Konstruksi	6,32	6,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,55	12,54
8	Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,83
10	Informasi dan Komunikasi	0,47	0,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	0,96
12	Real Estate	2,30	2,30
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,54	1,56
15	Jasa Pendidikan	0,49	0,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,33	0,33
17	Jasa lainnya	0,08	0,08
PDRB		100	100

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017

Dari tabel diatas penyumbang PDRB kabupaten Labuhanbatu Selatan terbesar pada sektor Industri Pengolahan 40,22% karena terdapat banyak pabrik pengolahan CPO di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor unggulan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kecamatan Kampung Rakyat sebagai kecamatan yang paling besar menghasilkan panen kelapa sawit yaitu 160.682 ton, Sungai Kanan 148.650 ton, Kota Pinang 146.450

ton, Torgamba 126.590 ton dan Silangkitang 44.932 ton (bps: labuhanbatu selatan dalam angka 2016). Sektor Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang. Penyumbang PDRB terkecil yaitu 0,02%. Mayoritas pendapatan masyarakat di kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan petani dan industri pengolahan seperti UMKM.

5. Keadaan Sosial

a. Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2015, jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri yang ada sebanyak 173 unit, dengan 2.173 orang guru dan 35.294 murid yang terdiri dari 18.515 murid laki-laki dan 16.779 murid perempuan. Rasio murid-guru untuk SD sebesar 16. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada sebanyak 28 unit, dengan 515 orang guru dan 7.984 murid yang terdiri dari 4.031 murid laki-laki dan 3.953 murid perempuan. Rasio murid-guru untuk SMP sebesar 16. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada sebanyak 10 unit, dengan 383 orang guru dan 4.297 murid yang terdiri dari 1.948 murid laki-laki dan 2.349 murid perempuan. Rasio murid-guru untuk SMU sebesar 11.

Berikut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu tentang tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2017 menurut kecamatan dan tingkat pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta yaitu:

Tabel 4.8
Tingkat Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Tahun
2017

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
1	Sungai Kanan	843	7.960	1.542	1.282
2	Torgamba	1.996	13.617	4.746	2.893
3	Kotapinang	1.945	8.325	2.024	2.821
4	Silangkitang	648	3.450	1.040	963
5	Kampung Rakyat	1.329	7.913	2.490	2.291
Total		6.761	40.995	11.842	10.250

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2017

Pada tabel diatas terlihat kecamatan yang mendominasi tingkat pendidikan yang tinggi ialah Kecamatan Torgamba, karena penduduk terbanyak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak di Kecamatan Torgamba.

b. Tingkat Kesehatan

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat 4 Rumah Sakit, 17 Puskesmas dan 309 Posyandu, 25 Klinik, dan 30 Polindes yang tersebar di 5 kecamatan. Tenaga medis yang tersedia yaitu dokter umum sebanyak 41 orang, dokter gigi 15 orang, dan dokter spesialis 1 orang. Sementara bidan sebanyak 430 orang dan perawat sebanyak 289 orang. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2016 yang tercatat ada 65.377 pasangan. Jumlah akseptor KB aktif pada tahun 2016 sebanyak 41.671 pasangan. Sedangkan alat kontrasepsi yang digunakan adalah Pil 13.089 pengguna, Suntik 12.377 pengguna, kondom 5.687, Implant 5.210 pengguna, dan IUD 3.080 pengguna. Berikut data ketersediaan sarana kesehatan di kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2012-2016

Tabel 4.9
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
2012-2016

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik Balai Pengobatan	Polindes
2012	4	-	17	313	17	31
2013	4	-	17	295	18	31
2014	4	-	17	295	24	31
2015	4	-	17	285	25	30
2016	4	-	17	309	25	30

Sumber : BPS Labuhanbatu 2017

Dari tabel diatas menunjukkan ketidak tersediaan rumah sakit bersalin di kabupaten Labuhanbatu Selatan, selama ini ibu-ibu melahirkan hanya di bantu dengan bidan atau dukun beranak. Kurang nya dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana kesehatan yang lengkap.

6. Analisis Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Dalam APBN tahun 2017, tentang transfer Daerah dan Dana Desa. Tiap desa di provinsi Sumatera Utara mendapat transfer Dana Desa sebesar Rp 720,442 juta yang di bagikan secara merata guna di alokasikan sesuai dengan RPJMDes yang berlaku di desa tersebut. Berikut paparan kabupaten/kota yang mendapatkan transfer Dana Desa di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.10
Sebaran Dana Desa Anggaran Tahun 2017
Di Provinsi Sumatera Utara

(ribu rupiah)

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Per Desa	Alokasi Per Kab/Kota	Alokasi Formula	Jumlah
	Kabupaten					
1	Asahan	177	720,442	127,518,234	14,454,327	141,972,561
2	Dairi	161	720,442	115,991,162	10,105,628	126,096,790
3	Deli Srdang	380	720,442	273,767,960	29,292,326	303,060,286
4	Karo	259	720,442	186,594,478	9,741,648	196,336,126
5	Labuhanbatu	75	720,442	54,033,150	8,336,132	62,369,282
6	Langkat	240	720,442	172,906,080	19,957,743	192,863,823
7	Mandaling Natal	377	720,442	271,606,634	12,441,884	284,048,518
8	Nias	170	720,442	122,475,140	10,451,108	132,926,248
9	Simalungun	386	720,442	278,090,612	15,956,928	294,047,540
10	Tapanuli selatan	211	720,442	152,013,262	9,654,744	161,670,006
11	Tapanuli Tengah	159	720,442	114,550,278	8,842,956	123,393,234
12	Tapanuli Utara	241	720,442	173,626,522	7,072,304	180,698,826
13	Toba Samosir	231	720,442	166,442,102	7,041,625	173,463,727
14	Kota Padang Sidempuan	42	720,442	30,258,564	4,391,637	34,650,201
15	Pakpak Barat	52	720,442	37,462,984	5,020,897	42,483,881
16	Nias Selatan	459	720,442	330,682,878	16,135,592	346,818,470
17	Humbang Hasundutan	153	720,442	110,227,626	7,,285,660	117,513,286
18	Serdang Bedagai	237	720,442	170,744,754	13,106,061	183,849,815
19	Samosir	128	720,442	92,216,576	7,811,227	100,027,803
20	Batu Bara	141	720,442	101,582,322	11,795,034	113,377,356
21	Padang Lawas	303	720,442	218,293,926	9,882,445	228,176,371
22	Padang Lawas Utara	387	720,442	278,811,054	9,270,857	288,081,911
23	Labuhanbatu Selatan	52	720,442	37,462,984	8,559,478	46,022,462
24	Labuhanbatu Utara	82	720,442	59,076,244	9,570,695	68,646,939
25	Nias Utara	112	720,442	80,689,504	11,134,690	91,824,194
26	Nias Barat	105	720,442	75,646,410	8,088,286	83,734,696
27	Kota Gunungsitoli	98	720,442	70,603,316	9,214,822	79,818,138
JUMLAH		5,418	19,451,934	3,903,354,756	294,617,34	4,197,972,490

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017

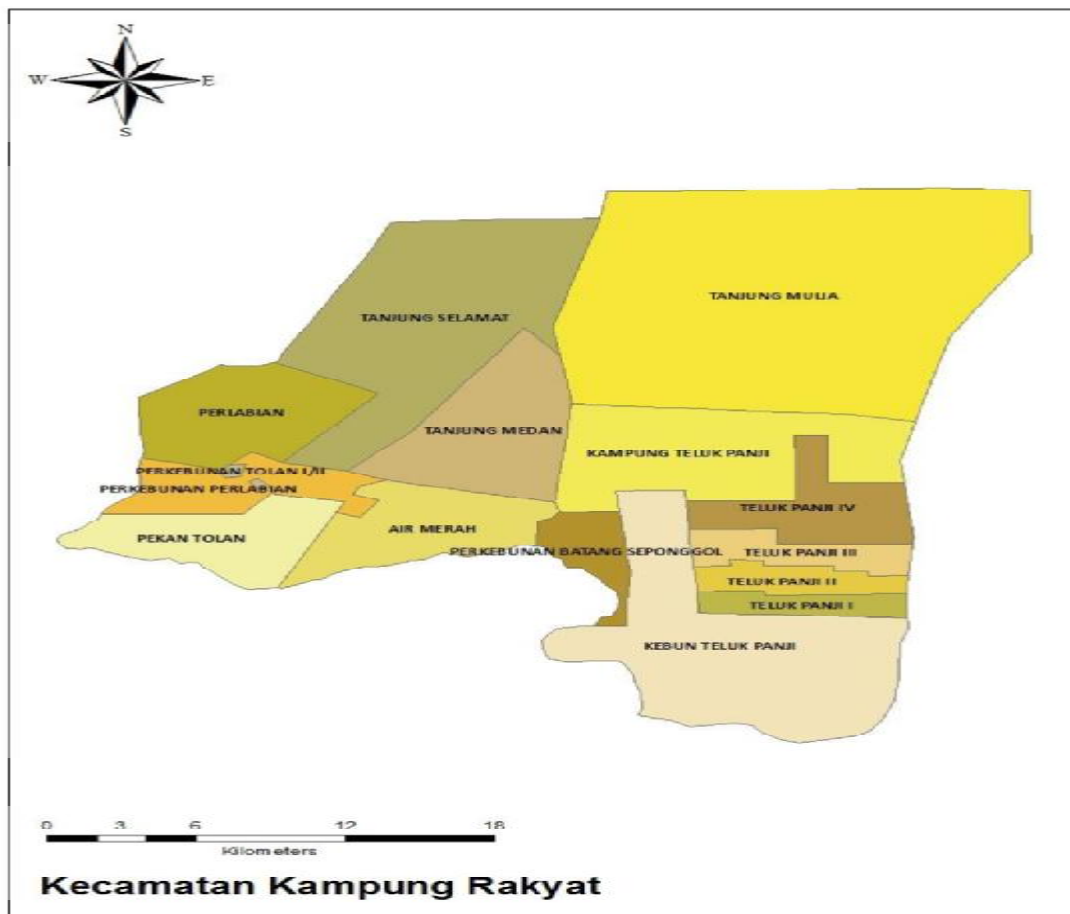
Dari tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa kabupaten Nias Selatan menerima transfer Dana Desa terbesar yaitu Rp 346,818,470 dengan jumlah desa 459 dan jumlah transfer yaitu Rp 720,442, Namun kota Padang Sidempuan mendapatkan transfer terendah yaitu Rp 34,650,201 dengan jumlah desa 42.

B. Kondisi Geografi Kecamatan Kampung Rakyat

Kecamatan Kampung Rakyat menempati area seluas 709,15 Km² yang terdiri dari 15 desa. Wilayah Kecamatan Kampung Rakyat di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotapinang. Dari 15 desa yang terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Air Merah dengan luas 105,49 Km² dan yang terkecil adalah Desa Teluk Panji III dengan luas 7,94 Km² Dan ketinggian 0-800 m DPL. Jarak tempuh ke kantor bupati ialah 43km.

Gambar 4.2

Peta Kampung Rakyat



Kecamatan Kampung Rakyat terdiri dari 15 desa, dimana yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Kampung Rakyat adalah Desa Teluk Panji IV dengan jarak 75,00 Km. Di Kecamatan Kampung Rakyat terdapat 96 dusun, dimana dusun terbanyak terdapat di Desa Perkebunan Teluk Panji yaitu sebanyak 15 dusun, sementara desa yang memiliki dusun paling sedikit adalah Desa Teluk Panji III yaitu sebanyak 2 dusun.

1. Luas Wilayah

Data luas wilayah menurut desa/kelurahan pada tahun 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Labuhanbatu

Tabel 4.11
Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total
1	Kamp. Perlabian	67,00	9,45
2	Perk. Perlabian	105,44	14,87
3	Pekan Tolan	25,60	3,61
4	Tolan I/II	19,96	2,81
5	Air Merah	105,49	14,88
6	Perk. Batang Sepongol	38,05	5,37
7	Perk. Teluk Panji	77,84	10,98
8	Teluk Panji I	10,45	1,47
9	Teluk Panji II	10,21	1,44
10	Teluk Panji III	7,49	1,12
11	Teluk Panji IV	10,79	1,52
12	Kamp. Teluk Panji	12,06	1,70
13	Tanjung Medan	85,42	12,05
14	Tanjung Selamat	28,25	3,98
15	Tanjung Mulia	104,65	14,76
Jumlah		709,15	100

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2017

Data diatas menunjukkan Desa Air Merah merupakan desa terluas dengan luas wilayah 105,49 Km², serta Desa Teluk Panji III merupakan desa terkecil dengan luas wilayah 7,49 Km². Sedangkan desa Tolan I/II memiliki luas wilayah 19,96 Km².

2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kampung Rakyat

Penduduk Kecamatan Kampung Rakyat tahun 2016 sebanyak 59.595 jiwa yang terdiri dari 30.441 jiwa laki-laki dan 29.154 jiwa perempuan. Jumlah terbanyak terdapat di Desa Perkebunan Teluk Panji yaitu sebanyak 9.270 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perk. Tolan I/II yaitu sebanyak 449 jiwa. Berikut luas, jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Kampung Rakyat menurut desa/kelurahan

Tabel 4.12

**Luas, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan
Pada Tahun 2017**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kamp. Perlabian	67	6.762	101
2	Perk. Perlabian	105,44	3.201	30
3	Pekan Tolan	25,60	4.268	167
4	Tolan I/II	19,96	449	22
5	Air Merah	105,49	3.187	30
6	Perk. Batang Spongol	38,05	700	18
7	Perk. Teluk Panji	77,84	9.270	119
8	Teluk Panji I	10,45	1.709	164
9	Teluk Panji II	10,21	1.355	133
10	Teluk Panji III	7,94	1.419	179
11	Teluk Panji IV	10,79	1.988	184
12	Kamp. Teluk Panji	12,06	6.818	565
13	Tanjung Medan	85,42	6.895	81
14	Tanjung Selamat	28,25	3.547	126
15	Tanjung Mulia	104,65	8.027	77
Jumlah		709,15	59.595	84

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2017

3. Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kampung Rakyat

Sarana Pendidikan merupakan fasilitas utama yang ada di suatu daerah. Karena dengan fasilitas pendidikan yang layak dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di daerah tersebut dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Begitu juga tingkat pendidikan di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didukung oleh tersedianya sekolah, tenaga guru dan murid dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah. Pada tahun 2016 terdapat 41 SD, 9 SLTP dan 8 SLTA. Berikut paparan tingkat pendidikan di Kecamatan Kampung Rakyat yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

Tabel 4.13
Tingkat Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan
di Kecamatan Kampung Rakyat
Pada Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA
1	Kamp. Perlabian	577	88	602
2	Perk. Perlabian	782	163	-
3	Pekan Tolan	340	171	-
4	Tolan I/II	457	-	-
5	Air Merah	355	-	-
6	Perk. Batang Saponggol	187	-	-
7	Perk. Teluk Panji	1049	853	808
8	Teluk Panji I	403	-	-
9	Teluk Panji II	322	502	-
10	Teluk Panji III	300	-	-
11	Teluk Panji IV	454	202	190
12	Kamp. Teluk Panji	251	-	-
13	Tanjung Medan	1386	392	491
14	Tanjung Selamat	234	-	-
15	Tanjung Mulia	816	119	200
Jumlah		7.913	2.490	2.291

Sumber : BPS Labuhanbatu 2017

Dari data yang disajikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya persentase tingkat pendidikan yang banyak ialah tingkat Sekolah Dasar serta diikuti dengan SMP dan SMA. Adapun alasan diatas ialah masih kurang fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan belajar. Oleh sebab itu banyak orang tua yang memasukan anaknya kesekolah di luar kota, alasannya ialah agar dapat bersekolah ditempat yang bagus. Namun dari hal tersebut ada pula faktor yang memperngaruhinya ialah faktor gengsi atau gaya hidup, jika ada anaknya yang menempuh pendidikan diluar daerah makan akan dianggap keluarga yang mampu dan mewah.

4. Tingkat Perekonomian Kecamatan Labuhanbatu Selatan

Pada daerah Kecamatan Kampung Rakyat komoditi dan potensi utama ialah kelapa sawit baik perkebunan maupun milik pribadi. Tanaman perkebunan rakyat yang terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat adalah kelapa sawit dengan luas tanam 17.751,00 Ha dan produksi 237.214,00 ton, kemudian karet dengan luas tanam 4.345,00 Ha dan produksi 24.871,00 ton. Jenis tanaman lainnya ialah Jenis Tanaman palawija. Tanaman palawija yang terbanyak terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat adalah jagung dengan luas tanam 75,00 Ha dan produksi sebesar 184,89 ton, sedangkan yang terkecil adalah kedelai dengan luas tanam 6,00 Ha dan produksi sebesar 10,33 ton.

Pada desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah sumber atau potensi perekonomiannya adalah kelapa sawit. Mayoritas penghasilan utama penduduk kedua desa merupakan dari hasil kelapa sawit. Ada juga penghasilan masyarakat yang bersumber dari pertanian palawija.

C. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian sebanyak 2 desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. Desa tersebut ialah Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah. Alasan pemilihan sampel di 2 desa tersebut karena sesuai data yang diperoleh dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwasannya Desa Perkebunan Tolan I/II ialah desa yang tertinggal menjadi berkembang dan Desa Air Merah ialah desa yang berkembang menjadi mandiri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan keberadaan kedua desa tersebut sama-sama berada pada Kecamatan Kampung Rakyat.

Serta untuk menguatkan data yang diperoleh dari observasi lapangan maka dilakukan riset menggunakan cara penyebaran beberapa angket ke penduduk sekitar. Apakah data yang diperoleh dari aparat desa sesuai dengan kenyataan yang ada pada penduduk sekitar. Total angket yang disebar masing-masing desa sebanyak 20 yang diambil menurut penyebaran tempat tinggal penduduk. Dalam arti 10 angket penduduk yang radius bertempat tinggal dekat dengan kantor desa dan 10 angket untuk penduduk yang tempat tinggalnya jauh dengan keberadaan kantor desa. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar penduduk di desa tersebut mengerti dan paham bahkan ikut serta dengan adanya Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membangun desa baik dari segi perekonomian dan perkembangan infrastruktur.

Menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kriteria desa berkembang ialah

- memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya.
- kekurangan sumber keuangan atau dana untuk mengelolah potensi di desa tersebut.
- belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota.
- Sumber Daya Manusia yang berpendidikan tinggi masih rendah.
- Memiliki sifat gotong royong

Begitu pula menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kriteria desa yang mandiri ialah

- Memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dan Memiliki Sumber Daya Alam dan potensi yang melimpah
- Memiliki modal yang cukup untuk memanfaatkan potensi
- Sarana prasarana pendukung yang lengkap
- Tingkat perekonomian yang relatif tinggi

Berikut salinan data mengapa mengambil objek penelitian di desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah, desa yang tertinggal menjadi berkembang dan berkembang menjadi mandiri tersebut yang diperoleh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tabel 4.14
Daftar Desa Tertinggal Menjadi Berkembang Di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Pada Tahun 2017

Provinsi	Kabupaten /Kota	Kecamatan	Desa	Indeks Pembangunan Desa	Indeks Pelayanan Desa	Indeks Kondisi Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas/ Transprtasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pemerintah
Sumatera Utara	Labuhanbatu selatan	Kampung Rakyat	Perk. Tolan I/II	58.68	54.52	55.02	63.55	62.23	66.97

Sumber data : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017

Tabel 4.15
Daftar Desa Berkembang Menjadi Mandiri Di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Pada Tahun 2017

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Indeks Pembangunan Desa	Indeks Pelayanan Desa	Indeks Kondisi Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas /Transpirasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pemerinta
Sumatera Utara	Labuhanbatu selatan	Kampung Rakyat	Air Merah	63.83	68.29	58.07	63.55	61.22	66.97

Sumber data : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017

2. Potensi Ekonomi di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai penyebaran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah serta keakuntabilan yang melibatkan penduduk dalam pengelolaannya. Sebelum jauh membahas tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, potensi perekonomian di kedua desa tersebut ialah berupa kelapa sawit. Mayoritas penduduk desa berpenghasilan dari pertanian kelapa sawit. Dapat dilihat pada tabel dibawah perbandingan produksi hasil pertanian di kedua desa tersebut

Tabel 4.16

Produksi Pertanian Penduduk di Desa Perkebunan Tolan I/II

Dan Desa Air Merah Tahun 2017 (Ton)

No	Nama Desa	Kelapa Sawit	Jagung	Ubi Kayu	Kacang Tanah	Kedelai
1	Perk. Tolan I/II	6.212	29,14	32,10	1,52	1,02
2	Air Merah	8.228	20,12	27,05	1,00	0,82

Sumber : Kecamatan Kampung Rakyat Dalam Angka 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya komoditi kelapa sawit sangat dominan di bandingkan dengan yang lain. Memang sebagian besar pendapatan masyarakat di Kecamatan Kampung Rakyat berupa hasil dari kelapa sawit. Dikarenakan kondisi iklim dan alam di sekitaran Kampung Rakyat memang hanya komoditi tersebut yang bagus. Namun khususnya di Provinsi Sumatera Utara juga sebagian besar penghasilan penduduknya berupa kelapa sawit.

3. Desa Perkebunan Tolan I/II

a. Letak Wilayah

Secara astronomis desa Perkebunan Tolan I/II terletak pada $2^{\circ} 04'07''271^{\circ}$ $08'28''$ Lintang Utara. Secara administrasi Desa Tolan I/II Kecamatan Kampung Rakyat. Desa Tolan I/II memiliki jarak 4 km ke ibukota kecamatan. Desa Tolan I/II memiliki luas wilayah $19,96 \text{ km}^2$ serta memiliki 2 dusun dan jumlah penduduk 449 jiwa.

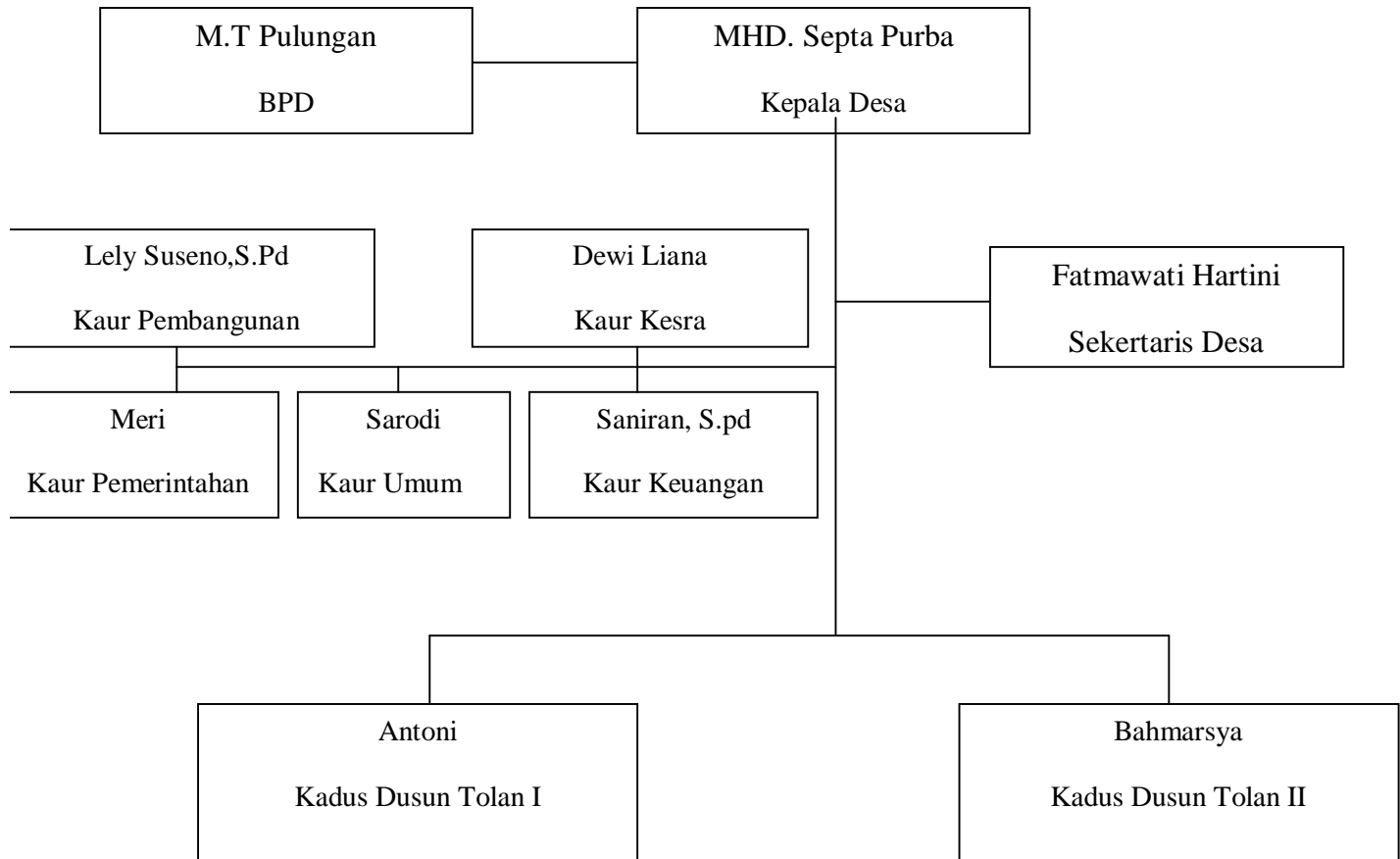
Desa Tolan I/II memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Perlabian, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu, sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung Medan dan sebelah selatan berbatasan dengan Perkebunan Perlabian.

b. Struktur Pemerintahan

Desa Perkebunan Tolan I/II di dipimpin oleh Bapak MHD. Septa Purba dan beberapa jajaran aparatur pemerintahan desa lainnya. Berikut struktur pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II

Gambar 4.3

Struktur Pemerintahan Desa Perk.Tolan I/II



Diatas merupakan bagan struktural pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II yang berlaku 2015 hingga sekarang.

c. Kondisi Penduduk

Penduduk Kecamatan Kampung Rakyat tahun 2016 sebanyak 59.595 jiwa yang terdiri dari 30.441 jiwa laki-laki dan 29.154 jiwa perempuan. Jumlah terbanyak terdapat di Desa Perkebunan Teluk Panji yaitu sebanyak 9.270 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perk. Tolan I/II yaitu sebanyak 449

jiwa. Berikut luas, jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Kampung Rakyat menurut desa/kelurahan

Tabel 4.17
Luas, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan
Pada Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kamp. Perlabian	67	6.762	101
2	Perk. Perlabian	105,44	3.201	30
3	Pekan Tolan	25,60	4.268	167
4	Tolan I/II	19,96	449	22
5	Air Merah	105,49	3.187	30
6	Perk. Batang Sappinggol	38,05	700	18
7	Perk. Teluk Panji	77,84	9.270	119
8	Teluk Panji I	10,45	1.709	164
9	Teluk Panji II	10,21	1.355	133
10	Teluk Panji III	7,94	1.419	179
11	Teluk Panji IV	10,79	1.988	184
12	Kamp. Teluk Panji	12,06	6.818	565
13	Tanjung Medan	85,42	6.895	81
14	Tanjung Selamat	28,25	3.547	126
15	Tanjung Mulia	104,65	8.027	77
Jumlah		709,15	59.595	84

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2017

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk di desa Perkebunan Tolan I/II yaitu 449 jiwa, dan yg terbanyak ialah desa Perkebunan Teluk Panji yaitu 9.270 jiwa.

d. Tingkat Pendidikan

Pada desa Perkebunan Tolan I/II jumlah peserta didik yaitu 457. Itu pun hanya tingkat pendidikan Sekolah Dasar saja. Sementara untuk sekolah lanjutan para penduduk menyekolahkan anaknya di luar desa. Penyebabnya ialah karena desa

Perkebunan Tolan I/II dibawah naungan PT. Tolan Tiga Indonesia dan jumlah penduduknya juga sedikit.

e. Alokasi Dana Desa

1. Perkembangan Infrastruktur dan Sarana Publik

Hasil observasi lapangan yang bertujuan untuk memperkuat data dan mengevaluasi tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah apakah kebijakan yang di buat selama ini berjalan sesuai dengan target pembangunan dan tidak lain untuk memajukan perekonomian indonesia. Berikut data tabel perkembangan infrastruktur yang anggaran pengelolaan dan pembangunannya menggunakan Alokasi Dana Desa di Desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah

Tabel 4.18

**Perkembangan Infrastruktu dan Sarana Publik di Desa
Perkebunan Tolan I/II Pada Tahun 2016 dan 2017**

No	Uraian	Tahun 2016		Uraian	Tahun 2017	
		Anggaran (Rp)	Keterangan		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan penerangan jalan, taman dan perbaikan jalan	180.295.500	Sumber DD	Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan	49.692.900	Sumber DI
2	Pengadaan buku dan kepustakaan	47.000.000	Sumber DD	Sarana dan prasarana produksi desa	93.293.633	Sumber DI
3	Polindes	16.300.00	Sumber DD	Pengelolaan sampah	15.000.000	Sumber DI
4	Pemberdayaan posyandu UP2K dan BKB	6.141.500	Sumber DD	Pengadaan komputer	10.807.100	Sumber DI
5	Kegiatan posyandu	34.318.135	Sumber DD	Pengadaan buku	35.485.800	Sumber DI

Sumber : Pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II

Tabel diatas hanya menunjukan tahun 2016-2017, sedangkan data yang dibutuhkan yaitu 3 tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh pergantiannya aparatur di desa tersebut dan rekapitulasinya tidak terlihat. Terlihat jelas perkembangan

infrastruktur di Desa Perkebunan Tolan I/II seperti pengadaan penerangan jalan yang menggunakan energi panas matahari. Dapat dilihat juga sedikit pembangunan jalan dan perbaikan jalan. Hal ini disebabkan Desa Perkebunan Tolan I/II merupakan desa perkebunan yang di bawah naungan PT. Tolan Tiga Indonesia maka dari sebab itu desa Perkebunan Tolan I/II sedikit menggunakan Alokasi Dana Desa untuk membangun atau pun memperbaiki fasilitas publik dan jalan karena untuk membangun jalan harus melalui prosedur yang akan disetujui oleh pihak PT. Tolan Tiga Indonesia. Maka dari itu ruang gerak untuk desa tersebut sangat sedikit. Bahkan kantor desa masih numpang dengan perkebunan.

Namun data yang diperoleh melalui observasi lapangan menunjukkan bahwasannya dana yang digunakan untuk membangun jalan dialihkan untuk membangun berbagai macam kegiatan desa. Berikut paparan pengalihan sumber dana desa di tahun 2016 dan 2017 di Desa Perkebunan Tolan I/II

Tabel 4.19

Pengalihan Alokasi Dana Desa Untuk Kegiatan Desa Lainnya

Pada Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun 2016		Uraian	Tahun 2017	
		Anggaran (Rp)	Keterangan		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemberdayaan masyarakat I	317.275.241	Sumber DD	Sarana prasarana produksi desa	93.293.633	Sumber DE
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	12.280.000	Sumber DD	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	50.381.000	Sumber DE
3	Pelatihan teknologi tepat guna	26.944.000	Sumber DD	Kegiatan pelatihan kelompok tani	24.751.500	Sumber DE
4	Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga	31.011.452	Sumber DD	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna	76.327.100	Sumber DE
5	Pemberdayaan masyarakat II	27.000.000	Sumber DD	Kegiatan pemberdayaan masyarakat III	30.683.000	Sumber DE

Sumber : Pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II

Data diatas menunjukkan pengalihan dana untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dengan mengalihkan anggaran untuk keperluan lain yang positif. Bahkan dengan pengalihan anggaran tersebut dapat membina karakteristik sumberdaya manusia yang lebih mandiri.

2. Pengalokasian Dana Desa

Kementrian Keuangan Indonesia memberikan kebijakan transferdana daerah berupa dana desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong kurang efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan perekonomian di setiap desa mengindikasikan kurang efektifnya penyaluran dana desa yang besaran transfernya sama. Karena setiap desa pasti memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga berbeda. Di desa yang sedang berkembang membutuhkan sokongan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian di desa tersebut. Berikut ini rekapitulasi Dana Desa dikabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi

Tabel 4.20

Rekapitulasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Provinsi	Kabupaten	Tahun	Nominal
Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	2015	16.387.486
		2016	36.783.045
		2017	46.022.462

Sumber : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi

Penyebaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan proposrsinya. Dan dapat dipergunakan untuk membangun pedesaan. Meningkatkan mutu perekonomian dan sumber daya manusia.

Penyebaran Alokasi Dana Desa baik besaran dan pengalokasiannya di desa Perkebunan Tolan I/II serta pendapatan asli yang diperoleh desa dapat dilihat dari tabel APBDes dibawah ini.

Tabel 4.21

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Perk. Tolan I/II

Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Pendapatan		
	Pendapatan transfer	632.257.000	
	Dana desa	632.257.000	
2	Belanja		
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	198.057.000	Sumber DDS
	Polindes	16.300.000	
	Pembentukan BUMDes	1.462.000	
	Pelaksanaan pembangunan desa lainnya	180.295.000	
	Bidang pemberdayaan masyarakat	317.275.241	Sumber DDS
	Pelatihan kepala desa dan perangkat	32.900.000	
	Pemberdayaan posyandu	6.141.500	
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	12.280.000	
	Pelatihan teknologi tepat guna	26.944.000	
	Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga	31.011.452	
	Kegiatan posyandu	34.318.135	
	Pemberdayaan masyarakat lainnya I	47.319.000	
	Pemberdayaan masyarakat lainnya II	34.271.154	
	Pemberdayaan masyarakat lainnya III	49.500.00	
	Total	515.332.741	
3	Pembiayaan		
	Penerimaan pembiayaan	3.075.741	
	Pengeluaran pembiayaan	120.000.000	
	Total	116.924.259	

Sumber : Pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II

Dari data tabel diatas bahwasannya pengeluaran bidang pemberdayaan masyarakat jauh lebih tinggi yaitu Rp317.279.000 di bandingkan dengan pembangunan desa yang hanya sekitar Rp198.057.000. desa Perkebunan Tolan I/II melimpahkan anggaran pembangunan desa kepada anggran pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.22

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Perk. Tolan I/II

Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Pendapatan		
	Pendapatan transfer	797.813.000	
	Dana desa	797.813.000	
2	Belanja		
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	157.986.533	Sumber DDS
	Pengadaan sarana prasarana taman bacaan	49.692.000	
	Sarana prasarana produksi desa	93.293.633	
	Pengelolaan sampah	15.000.000	
	Bidang pemberdayaan masyarakat	216.972.600	Sumber DDS
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	50.381.000	
	Pelantikan kelompok tani	24.751.000	
	Pelatihan teknologi tepat guna	76.327.100	
	Promosi kesehatan dan gerakan PHBS	10.696.000	
	Kegiatan posyandu	24.134.000	
	Kegiatan posyandu	34.318.135	
	Pemberdayaan masyarakat lainnya	30.683.000	
	Total	374.959.133	
3	Pembiayaan		
	Penerimaan pembiayaan	77.146.133	
	Pengeluaran pembiayaan	500.000.000	
	Total	422.853.867	

Sumber : Pemerintahan Desa Perkebunan Tolan I/II

Pada anggaran tahun 2017 pengeluaran bidang pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan, sebelumnya pada tahun 2016 yaitu Rp515.332.741. Pada tahun 2017 desan Perkebunan Tolan I/II banyak melakukan pembenahan

infrastruktur dan sarana publik seperti pembangunan taman baca dan melakukan pelatihan usaha kecil dan industri rumah tangga. Sebagaimana data yang di peroleh, di desa tersebut terdapat beberapa pelatihan seperti, pelatihan menjahit pelatihan mengelas dan pelatihan pembuatan pakan ikan.

3. Keakuntabilisan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dari hasil obsevasi lapangan yang dilakukan di desa Perkebunan Tolan I/II menunjukkan bahwasannya keakuntabilisan dan keterbukaan tentang pengalokasian Dana Desa masih sangat kurang, dikarenakan hanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor desa saja yang mengetahui besaran pengalokasian Dana Desa serta pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebaliknya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor desa sangat kurang paham tentang Alokasi Dana Desa tersebut. Mereka hanya mengetahui apa-apa saja yang dibangun karena dalam bentuk fisik yang terlihat dimata.

Minimnya informasi tentang pengalokasian Dana Desa di sebabkan oleh pemerintah dan aparatur desa menginformasikannya hanya melalui musyawarah desa dan hanya di hadiri oleh perwakilannya saja, serta melampirkan baliho atau sepanduk yang itu hanya terpasang di kantor desa saja, tidak ada baliho atau sepanduk yang terpasang menyebar di kedua desa tersebut. Maka dari pada itu minimnya pengetahuan dan keikut sertaan masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa dapat mengindikasikan terjadinya penyelewengan anggaran Dana Desa.

3. Desa Air Merah

a. Letak Wilayah

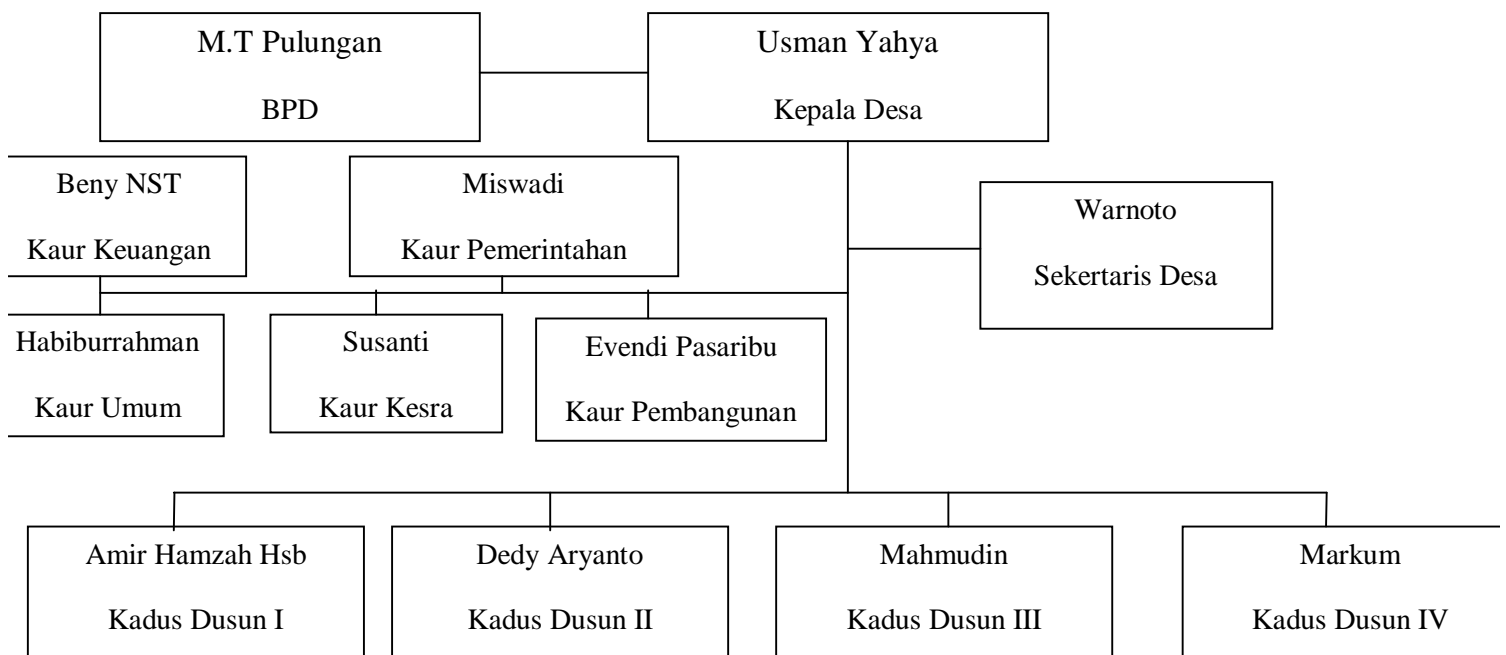
Secara astronomis desa Perkebunan Tolan I/II terletak pada $2^{\circ} 04'07''271^{\circ}$ $08'28''$ Lintang Utara. Secara administrasi Desa Air Merah memiliki luas wilayah 105,49 km² serta memiliki 4 dusun dan jumlah penduduk 3.187 jiwa. Batasan wilayah Desa Air Merah ialah sebelah utara Desa Tanjung Medan, sebelah barat berbatasan dengan Perkebunan Perlabian dan desa Pekan Tolan, sebelah timur berbatasan dengan Perkebunan Batang Seponggol dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Pinang.

b. Struktur Pemerintahan

Desa Air Merah di dipimpin oleh Bapak Usman Yahya dan beberapa jajaran aparatur pemerintahan desa lainnya. Berikut struktur pemerintahan Desa Air Merah

Gambar 4.4

Struktur Pemerintahan Desa Air Merah



b. Jumlah Penduduk

Penduduk Kecamatan Kampung Rakyat tahun 2016 sebanyak 59.595 jiwa yang terdiri dari 30.441 jiwa laki-laki dan 29.154 jiwa perempuan. Jumlah terbanyak terdapat di Desa Perkebunan Teluk Panji yaitu sebanyak 9.270 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perk. Tolan I/II yaitu sebanyak 449 jiwa. Berikut luas, jumlah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Kampung Rakyat menurut desa/kelurahan

Tabel 4.23

**Luas, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan
Pada Tahun 2017**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Kamp. Perlabian	67	6.762	101
2	Perk. Perlabian	105,44	3.201	30
3	Pekan Tolan	25,60	4.268	167
4	Tolan I/II	19,96	449	22
5	Air Merah	105,49	3.187	30
6	Perk. Batang Saponggol	38,05	700	18
7	Perk. Teluk Panji	77,84	9.270	119
8	Teluk Panji I	10,45	1.709	164
9	Teluk Panji II	10,21	1.355	133
10	Teluk Panji III	7,94	1.419	179
11	Teluk Panji IV	10,79	1.988	184
12	Kamp. Teluk Panji	12,06	6.818	565
13	Tanjung Medan	85,42	6.895	81
14	Tanjung Selamat	28,25	3.547	126
15	Tanjung Mulia	104,65	8.027	77
Jumlah		709,15	59.595	84

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu 2017

Pada tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk di desa Air Merah yaitu 3.187 dengan luas wilayah 105,49 km² dan yg terbanyak ialah desa Perkebunan Teluk Panji yaitu 9.270 jiwa.

d. Tingkat Pendidikan

Pada desa Air Merah jumlah peserta didik yaitu 355. Itu pun hanya tingkat pendidikan Sekolah Dasar saja. Sementara untuk sekolah lanjutan para penduduk menyekolahkan anaknya di luar desa.

e. Alokasi Dana Desa

1. Perkembangan Infrastruktur dan Sarana Publik

Kementrian Keuangan Indonesia memberikan kebijakan transferdana daerah berupa dana desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong kurang efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk dan keadaan perekonomian di setiap desa mengindikasikan kurang efektifnya penyaluran dana desa yang besaran transfernya sama.

Air Merah yang keadaan desanya jauh lebih baik karena keadaan desa tersebut menurut data yang di peroleh dari Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi ialah desa yang berkembang menjadi Mandiri. Karena keadaan infrastruktur di desa tersebut mengalami perkembangan dan pembenahan di berbagai aspek sehingga roda perekonomian didesa tersebut bergerak secara dinamis.

Berikut data dan penyebaran pembangunan infrastruktur dan sarana publik lainnya yang anggaran pembangunannya menggunakan Alokasi Dana Desa

Tabel 4.24
Perkembangan Infrastrukturu dan Sarana Publik di Desa
Air Merah Pada Tahun 2016 dan 2017

No	Uraian	Tahun 2016		Uraian	Tahun 2017	
		Anggaran (Rp)	Keterangan		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan sarana prasarana desa	80.000.000	Sumber DD	Pembangunan sarana prasarana desa	43.470.000	Sumber DD
2	Pembangunan pos kamling 11 unit	72.919.000	Sumber DD	Jalan desa	527.148.000	Sumber DD
3	Pengerasan jalan dusun Suka Maju	108.500.000	Sumber DD	Pembenahan fisik kantor	86.179.750	Sumber DD
4	Pembangunan parit beton dusun Air Serdang sepanjang 500m	190.460.000	Sumber DD	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	611.954.189	Sumber DD
5	Pembangunan parit beton dusun Gariang Pasar sepanjang 500m	190.460.000	Sumber DD	Pengadaan komputer	11.560.200	Sumber DD
6	Pembangunan perpustakaan desa	6.471.000	Sumber DD	Taman baca	20.026.200	Sumber DD
7	Sarana olahraga	29.429.000	Sumber DD	Pembinaan dan pembangunan fasilitas Karang Taruna	32.790.000	Sumber DD

Sumber : Pemerintahan Desa Air Merah

Dengan melihat data yang ada diatas dapat kita simpulkan bahwasannya pembangunan infrastruktur di Desa Air Merah cukup banyak. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak luput bertujuan untuk memudahkan ruang gerak penduduk di desa tersebut. Dengan bagusnya keadaan infrastruktur yang ada makan perekonomian didesa tersebut bergerak dengan muda.

2. Pengalokasian Dana Desa

Desa Air Merah juga sama seperti desa Perkebunan Tolan I/II banyak melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa. Dapat dilihat dari tabel dibawah pengalokasian Dana Desa untuk desa Air Merah

Tabel 4.25
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Air Merah
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Pendapatan		
	Pendapatan transfer	696.474.000	
	Hasil pajak	11.994.360	
	Alokasi Dana Desa	542.428.100	
	Jumlah	1.250.896.460	
2	Belanja		
	Belanja desa	1.086.855.400	Sumber DDS
	Belanja pegawai	208.500.000	
	Pembangunan pos kamling 11 unit	80.606.000	
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	647.966.000	Sumber DDS
	Pengerasan jalan dusun Suka Maju	108.500.000	
	Pembangunan 500 meter parit beton dusun Air Serdang	190.460.000	
	Pembangunan 500 meter parit beton dusun Gariang	190.460.000	
	Pembentukan BUMDes	28.400.000	
	Pembangunan perpustakaan desa	6.471.000	
	Bidang pembinaan masyarakat	144.932.600	Sumber DDS
	Bidang pemberdayaan masyarakat	48.508.000	Sumber DDS
	Total	1.086.855.400	
3	Pembiayaan		
	Penerimaan pembiayaan	63.041.060	
	Pengeluaran pembiayaan	101.000.000	
	Total	164.041.060	

Sumber : Pemerintah desa Air Merah

Pada tabel diatas dapat di lihat pengeluaran terbanyak desa Air Merah ialah pembangunan desa, sebab dengan adanya infrastruktur yang maju maka perekonomian di desa tersebut mangalami kemajuan. Pengeluaran desa Air Merah pada tahun 2017 meningkat seiring meningkatnya pendapatan transfer daerah berupa Alokasi Dana Desa yang din peruntukan guna membangun pedesaan. Berikut tabel pengeluaran desa Air Merah pada tahun 2017

Tabel 4.26
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Air Merah
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Anggaran	Keterangan
1	Pendapatan		
	Pendapatan transfer	872.396.000	
	Pendapatan asli desa	1.500.000	
	Hasil pajak	49.398.500	
	Alokasi Dana Desa	1.101.180.000	
	Jumlah	2.024.474.500	
2	Belanja		
	Bidang penyelenggara pemerintahan desa	611.954.189	Sumber DDS
	Belanja pegawai	283.200.000	
	Kegiatan operasional	248.387.700	
	Belanja modal	36.896.489	
	Pembangunan sarana prasarana desa	43.470.000	
	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	933.987.331	Sumber DDS
	Pembangunan jalan	527.148.381	
	Fisik kantor	86.179.750	
	Pembangunan taman baca	20.026.200	
	Bidang pembinaan masyarakat	362.897.169	Sumber DDS
	Bidang pemberdayaan masyarakat	67.956.000	Sumber DDS
	Total	1.976.794.689	
3	Pembiayaan	47.679.811	
	Total	2.024.474.500	

Sumber : Pemerintah desa Air Merah 2017

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembangunan di desa Air Merah dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan di tandai dengan besaran pengeluaran anggaran untuk pelaksanaan pembangunan desa yang sebesar Rp933.987.331 jauh lebih besar dari pengeluaran lainnya, hal tersebut terjadi seiring besaran Alokasi Dana Desa yang diterima meningkat. Dengan ini pemerintah pusat dapat merealisasikan kebijakan melalui pembangunan pedesaan untuk menggenjot perekonomian Indonesia.

3. Keakuntabilisan

Dari hasil observasi lapangan menunjukkan bahwasannya Desa Air Merah juga sama dengan Desa Perkebunan Tolan I/II yang kurang akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal itu dapat dilihat kurangnya sarana informasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada penduduk desa seperti pendirian baliho atau pun spanduk pendukung. Sarana itu hanya ada di kantor desa saja dan kurang efektif dalam memberikan informasi dikarenakan hanya penduduk yang bertempat tinggal di sekitar desa saja yang mengetahui hal tersebut.

D. Perbandingan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut hasil penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Analisis Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbau Selatan yang terfokus pada desa Perkebunan Tolan I/II dan Desa Air Merah dimana kedua desa tersebut menurut Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah desa yang tertinggal menjadi berkembang dan berkembang menjadi mandiri. Pada kedua desa pengalokasian Dana Desa cukup baik dalam arti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran desa terwujud, namun dilihat dari sisi keefektifan pemberdayaan manusia desa Perkebunan Tolan I/II lebih efektif dilihat dari adanya berbagai pelatihan seperti pelatihan menjahit, pelatihan mengelas, pelatihan pembuatan pakan ikan dan pemberdayaan usaha kecil menengah serta industri rumah tangga.

Hal itu terjadi dikarenakan desa Perkebunan Tolan I/II merupakan desa yang dibawah naungan PT.Tolan Tiga Indonesia, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur di desa tersebut dapat dikatakan lambat. Berbeda dengan desa Air Merah yang fokus membangun infrastruktur baik fisik maupun nonfisik. Namun pemberdayaan manusia di desa tersebut masih rendah.

Dalam pengalokasian Dana Desa kedua desa tersebut dapat dikatakan keakuntabilisan dan transparansinya kurang. Karena tidak disediakan fasilitas informasi seperti baliho ataupun spanduk. Ada tapi hanya tersedia dikantor desa saja.

Jadi dari keseluruhan hasil penelitian diatas dapat ditarik pernyataan bahwasannya Kebijakan Alokasi Dana Desa yang ada di desa Perkebunan Tolan I/II dan desa Air Merah kurang efektif. Alasan tersebut ialah kurang keteransparansian dan keakuntabilisan dalam pengalokasian Dana Desa. Harus dilakukan berbagai sosialisasi dan penyuluhan agar kebijakan Alokasi Dana Desa ini sesuai dengan arah yang di harapkan oleh pemerintah pusat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun perekonomian Indonesia dari pinggiran pedesa di Indonesia banyak melakukan pembangunan dan hasilnya 74.954 desa di Indonesia mendapatkan transfer Alokasi Dana Desa dan Rp60.000 miliar anggaran yang di gelontorkan pemerintah pusat untuk Alokasi Dana Desa.
2. Pada kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat Satu desa yang tertinggal menjadi berkembang dan satu desa yang berkembang menjadi mandiri, hal tersebut terjadi karena pembangunan infrastruktur di dua desa tersebut sangat pesat dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana guna menunjang perekonomian disana. Tercatat 60% anggaran Alokasi Dana Desa di pergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan selebihnya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

3. Proporsi pembagian Alokasi Dana Desa tepat dan berjalan lancar dalam membangun peremonomian desa, hal itu di buktikan dengan pembentukan beberapa BUMDes yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa serta melakukan pelatihan-pelatihan guna memningkatkan kualits Sumbe Daya Manusia yang memiliki kerampilan. Serta menumbuhkan usaha kecil dan industri rumah tangga.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian proporsi setiap desanya haruslah berbeda, hal itu di sebabkan karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda jadi pengalokasian dan kebutuhannya juga berbeda.
2. Untuk menumbuhkan Sumber Daya Manusia harus di berikan bebrapa pelatihan yang intensif. Pelatihannya sudah ada namun masih kurang intensif karena ilmu dari pelatihan yang diberikan juga hanya sekedar.
3. Masyarakat yang kurang mengerti tentang Alokasi Dana Desa seharusnya di berikan sosialisasi agar mengerti dan juga harus di tunjang dengan adanya fasilitas informasi tentang pengalokasian dana desa, tidak hanya di kantor desa saja melaikan di seluruh sudut pedesaan agar masyarakat desa mengetahui tentang Alokasi Dana Desa. Dan aparatur pedesa kurang transparansi dalam mengolah Alokasi Dana Desa karena minimnya baliho atau spanduk yang mendukung ketransparansian penggunaan Alokasi Dana Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017
- Badan Pusat Statistik. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka. 2017
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu selatan Dalam Angka. 2017.
- Jhingan.2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenambelas*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Data Desa Tertinggal menurut Indeks Pembangunan Daerah. 2017.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesi. Rincian Dana Desa APBN. 2017.
- Kuncoro,Mudrajat.2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi Keempat*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga.
- Kuncoro,Mudrajat.2014. *Otonomi Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga.
- Michael, Stephen. 2011. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ni Kadek Darmiasih, Ni Luh Gd Erni Sulindawati dan Nyoman Ari Surya Darmawan.2015. *Analisis Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa (Study Kasus Desa Tri Buana, Kec.sidemen, Kab.Karangasem*. Bali. Jurnal Ekonomi. Volume 1 No: 3. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax.
(061) 6625474 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dian Kurniawan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Saya mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir. Kuesioner ini berhubungan dengan pendapat yang anda ketahui tentang Alokasi Dana Desa selaku narasumber. Hasil dari penelitian yang saya lakukan ini tidak dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Identitas Pribadi

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
.....
5. Pendidikan :
6. Pekerjaan :
7. No HP :

Daftar Pertanyaan

A. Apa sajakah potensi ekonomi di daerah ini

- a. Kelapa sawit
- b. Palawija
- c. Sawah

Alasan :

B. Sarana infrastruktur sesudah dan sebelum adanya Alokasi Dana Desa

1. Bagaimana keadaan jalan seblum dan sesudah adanya ADD

- Panjang jalan :
- Kondisi jalan :
- Lebar jalan :

2. Bagaimana keadaan pasar

3. Bagaimana keadaan sarana kesehatan

4. Bagaimana keadaan sarana pemerintah desa

- Kantor desa :
- Fasilitas desa :
- Dan lain-lain :

5. Adakah sarana publik lainnya

C. Keefektifitasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Berapa besar persentase penerimaan Alokasi semenjak adanya kebijakan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat

2. Berapa persentase ADD untuk Jalan
3. Berapa persentase ADD untuk Pasar
4. Berapa persentase ADD untuk sarana Kesehatan
5. Berapa persentase ADD untuk sarana Olahraga
6. Berapa persentase ADD untuk sarana lainnya

D. Ketransparansian aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa

1. Ada atau tidak sarana penjelasan baliho tentang pemaparan Alokasi Dana Desa yang diketahui masyarakat
2. Adakah aparatur desa yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa apakah melakukan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat didalamnya

E. Bagaimana perkembangan desa dari tahun ke tahun sebelum dan sesudah adanya Alokasi Dana Desa

F. Usaha yang dikelola pemereintah desa

1. Berapa jumlah usaha yang dikelola oleh desa
2. Berapa banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya